

**PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN
PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP KINERJA
KEUANGAN
(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah periode 2018-2020)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Awanda Maulidia

No. Mahasiswa: 16312392

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2022

**PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN
PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP KINERJA KEUANGAN**

(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah periode 2018-2020)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi

Oleh:

Nama: Awanda Maulidia

No. Mahasiswa: 16312392

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA UNIVERSITAS ISLAM

INDONESIA YOGYAKARTA 2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Semarang, 15 Juli 2022

Penulis,



(Awanda Maulidia)

**PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN
PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP KINERJA KEUANGAN
(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah periode 2018-2020)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

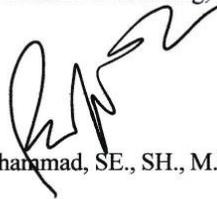
Nama: Awanda Maulidia

No. Mahasiswa: 16312392

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 7 Juni 2022

Dosen Pembimbing,



Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGELOLAAN ZAKAT
TERHADAP KINERJA KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA BANK UMUM SYARIAH
PERIODE 2018-2020)**

Disusun Oleh : **AWANDA MAULIDIA**

Nomor Mahasiswa : **16312392**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Jumat, 15 Juli 2022**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Rifqi Muhammad, SE., SH.,M.Sc.,SAS.,ASPM.,Ph.D. 

Penguji : Reni Yendrawati,Dra.,M.Si 

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia




Jehan Arifin, S.E., M.St., Ph.D.

HALAMAN MOTTO

**“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”**

(Q.S Al Insyirah: 5-6)



Kata Pengantar



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas hikmat dan rahmat-Nya dan junjungan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini, dengan judul **“Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Pengelolaan Zakat terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2020)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Selama proses penyusunan skripsi ini dimulai pada tahap persiapan, penyusunan, hingga terselesaikannya proposal penelitian ini penulis tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang memberi kelancaran dalam penelitian ini. Melalui kesempatan ini dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan berkat, nikmat, dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Sarjana dengan mengerjakan skripsi hingga selesai dengan baik.
2. Orang Tua tercinta Ibu Siti Khayatun dan Bapak Wanuri yang tak pernah berhenti untuk selalu memberikan dukungan, kasih sayang, nasihat, dan doa

untuk kelancaran penulis dalam menjalani kehidupannya.

3. Bapak Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D selaku dosen pembimbing yang memberikan nasihat, arahan, masukan, dukungan, kesabaran, dan waktu dalam hal akademis dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Mahmudi, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
6. Bapak Hendi Yogi Prabowo, SE., M.For.Accy., Ph.D. selaku dosen wali selama penulis berkuliah di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu akademik maupun non-akademik semasa perkuliahan.
8. Seluruh staff Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan moral selama penyusunan skripsi.
9. Willa Putri Malinda Buchori dan Reiga Farah Amalia sahabat seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, bantuan, doa, dan menyemangati penulis dalam hal apapun baik dalam proses perkuliahan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
10. Aldi Ramadhani partner setia yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan program sarjana.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.

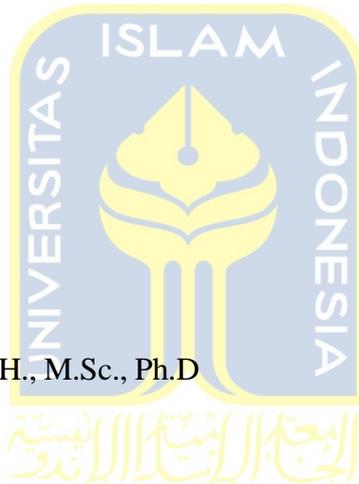
Penulis menyadari skripsi ini tidak sempurna karena masih terdapat kekurangan karena manusia tidak ada yang sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar karya penulis dapat lebih baik. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 4 Juni 2022

Penulis

Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D
Awanda Maulidia



DAFTAR ISI

Contents	
Halaman Judul	i
Halaman Motto	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vi
Abstrak	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori <i>Stakeholder</i>	9
2.1.2 Kinerja Keuangan.....	12
2.1.3 <i>Islamic Corporate Governance</i>	14
2.1.4 Pengelolaan Zakat	22
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Hipotesis Penelitian	31
2.3.1 Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah.....	31
2.3.2 Pengaruh Pengelolaan Zakat terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah ...	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian.....	34
3.2 Teknik dan Pengumpulan Data	35
3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel.....	36
3.3.1 Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah	36
3.3.2 <i>Islamic Corporate Governance</i>	36
3.3.3 Pengelolaan Zakat	42
3.4 Metode Analisis Data.....	42
3.5 Uji Statistik Deskriptif	43
3.6 Uji Asumsi Klasik.....	44

3.6.1 Uji Normalitas	44
3.6.2 Uji Heteroskedastistas	44
3.6.3 Uji Multikolinearitas	44
3.6.4 Uji Autokorelasi	45
3.7 Analisis Regresi Linier Berganda	45
3.7.1 Koefisien Determinasi R^2	45
3.8 Pengujian Hipotesis	45
3.8.1 Uji t	45
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	47
4.2 Statistik Deskriptif	47
4.3 Uji Asumsi Klasik	50
4.3.1 Uji Normalitas	50
4.3.2 Uji Heteroskedastistas	51
4.3.3 Uji Multikolinearitas	52
4.3.4 Uji Autokorelasi	52
4.4 Analisis Linear Berganda	53
4.4.1 Koefisien Determinasi R^2	53
4.4.2 Persamaan Regresi	54
4.5 Pengujian Hipotesis	55
4.5.1 Uji t	55
4.6 Pembahasan	56
4.6.1 Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Bank Umum Syariah.	56
4.6.2 Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Bank Umum Syariah 58	
BAB V PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan Penelitian	59
5.2 Keterbatasan pada Penelitian	59
5.3 Saran dari Penulis	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR LAMPIRAN	64

ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of islamic corporate governance and zakat management on the company's financial performance. The company's financial performance is proxied by Return on Asset (ROA) as the dependent variable and the independent variable used is islamic corporate governance with 47 indicators items based on General Guidelines for Sharia Business Governance by National Committee of Governance Policy. The sample selection method use purposive sampling, the data used in this research is secondary data from the annual reports for the period 2018, 2019, and 2020 which were obtained from the official website of each islamic bank in Indonesia, the total sample of this research is 14 sharia banks registered in Otoritas Jasa Keuangan. Data were processed using IBM SPSS Statistics version 25. The result showed that islamic corporate governance significantly had a negative and significant effect on the financial performance of islamic banking and zakat management had a positive and significant effect on the financial performance of islamic banking.

Keywords: *Islamic corporate governance, zakat management, company's financial performance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh islamic corporate governance dan pengelolaan zakat terhadap kinerja keuangan perusahaan di proxikan dengan menggunakan *Returns on Asset (ROA)* sebagai variabel *dependen* dan variabel *independent* yang digunakan adalah *islamic corporate governance* dengan 47 item indikator berdasarkan Pedoman Umum *Good Governance* yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*. Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan tahunan periode 2018, 2019, 2020 yang diperoleh dari *website* resmi masing-masing Bank Umum Syariah di Indonesia, jumlah sampel penelitian ini adalah 14 bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Data diolah menggunakan IBM SPSS Statistic versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *islamic corporate governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah dan pengelolaan zakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Kata Kunci: *Islamic corporate governance, pengelolaan zakat, kinerja keuangan perusahaan.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beriringan dengan adanya perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang melaju pesat akhir-akhir ini, di mana Indonesia yang menjadi negara dengan mayoritas penganut agama islam terbesar di dunia memiliki peran besar dalam membangun perekonomian syariah. Syariah adalah hal yang sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat di Indonesia saat membahas tentang bidang ekonomi yang dilihat dari sejarahnya pelaksanaan ekonomi syariah dimulai pada tahun 1991 didirikan PT Bank Muamalat Indonesia sebagai hasil dari diskusi tim perbankan MUI, lalu pada tahun 1998 pemerintah melakukan penyempurnaan Undang Undang No.7 tahun 1992 menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1998 yang menjelaskan bahwa terdapat dua sistem perbankan di Indonesia yaitu perbankan syariah dan konvensional (Nasional, 1998). Dengan adanya penyempurnaan UU bank syariah di Indonesia semakin bertambah yakni Bank Syariah Mandiri, Bank Ifi, Bank Mega, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Bukopin, Bank BRI, dan lain-lain, sampai sekarang banyak bermunculan bank umum syariah dan unit usaha syariah yang ditotal berjumlah 34 untuk Bank Umum Syariah Berjumlah 14 dan Unit Usaha Syariah berjumlah 20 (OJK, 2018, 2019, 2020).

Berkembangnya perbankan syariah di Indonesia juga dibuktikan dengan Indonesia meraih peringkat pertama dalam *Islamic Finance Country Index* (IFCI) pada *Global Islamic Finance Report* tahun 2021 (Bank Indonesia, 2021). Indonesia tidak pernah keluar dari peringkat 10 besar selama *Islamic Finance Country Index* (IFCI) diadakan sejak tahun 2010, ini membuktikan bahwa laju

perekonomian syariah Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. IFCI sendiri adalah pemeringkatan kondisi perbankan dan keuangan syariah berbagai negara.

Mengingat pentingnya laju perekonomian syariah dan perbankan syariah semakin digemari oleh masyarakat, dibuktikan dengan meningkatnya aset perbankan syariah meningkat sebesar 15,6 persen (*year-on-year*) pada Mei 2021 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah

Tahun	Pertumbuhan Aset
2018	12,57%
2019	9,93%
2020	13,11%
2021	15,6%

Sumber: (OJK, 2021)

Semakin besar pula suatu tanggung jawab pemerintah dan kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia dibutuhkan kepemimpinan yang baik dan timbal balik atas kepercayaan yang telah diberikan yang harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis sebagai bentuk pelaksanaan agama Islam sebagai *way of life* atau cara hidup.

Kinerja keuangan adalah suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan karena kinerja keuangan dapat memberikan gambaran kekuatan keuangan suatu perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam mengelola kegiatan operasional.

Kinerja yang baik dapat memberikan harapan yang baik bagi pengambil keputusan.

Kinerja keuangan adalah suatu indikator yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam menghasilkan keuntungan (Wahidah & Iman, 2019). Dengan kinerja keuangan dapat diketahui hasil atau pencapaian yang telah dilakukan oleh organisasi dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola aset perusahaan selama periode waktu tertentu. Untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah diperlukan cara yang tepat untuk mengukur kapabilitas perusahaan berdasarkan tujuan yang telah disusun, ini adalah proses penting karena dari pengukuran akan membantu perusahaan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pada perbankan syariah. Faktor pertama yang memengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah yaitu *islamic corporate governance*. Menurut Bhatti & Bhatti (2010) “ICG berusaha untuk menciptakan cara agar agen ekonomi, tata kelola perusahaan, dan hukum dapat dijalankan oleh nilai moral dan nilai sosial berdasarkan hukum islam. Tujuan ICG sama dengan tata kelola konvensional namun dalam moral dan nilai berbasis agama islam. Model ICG dapat diusulkan dengan menyelaraskan tujuan syariah dengan pemangku kepentingan tata kelola perusahaan.”

Selaras dengan ayat Al-Quran surat Saad (38) ayat 24 yang artinya : Dia (Daud) berkata, “sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambing itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada orang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah

mereka yang begitu.” Dan Daud menduga bahwa Kami mengujinya: maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat (Quran, n.d.-b).

Ayat di atas memberikan gambaran bahwa ada kecenderungan yang memungkinkan manusia untuk berbuat zalim kepada orang lain. Oleh karena itu dibutuhkan tata kelola perusahaan islam berbasis Al-Quran dan Hadis untuk menghindari perbuatan zalim dalam sebuah perusahaan. *Risk sharing* muncul ketika pihak-pihak yang bekerja sama dalam suatu perusahaan memiliki sikap yang berbeda dalam menghadapi risiko. Dalam bekerja sama di suatu entitas ada kecenderungan *moral hazard* untuk timbul, dengan kata lain pihak-pihak yang berwenang melakukan bisnisnya hanya untuk memenuhi kepentingannya sendiri, dan pihak lain dapat dirugikan. ICG bertanggungjawab secara spiritualitas, atas prinsip dasar transparansi, akuntabilitas, moralitas, bertanggung jawab, dan keandalan hanya berfungsi sebagai alat ukur material, yang penting dan hakiki adalah sebagai jalan menuju *ridha* Allah (Nunung & Sri, 2014). Menurut penelitian Khan & Zahid (2019) menyatakan *islamic corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian Kholilah & Wirman (2021) yang menyatakan bahwa *islamic corporate governance* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

Faktor kedua yang memengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah yaitu pengelolaan zakat. Menurut Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI (2015) Laporan keuangan entitas terdiri dari tujuh komponen : Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Perubahan Entitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, dan

Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagaimana yang tercantum suatu laporan keuangan entitas baru akan dikatakan lengkap apabila sudah terdapat 7 komponen dari laporan keuangan. Laporan Sumber dan penyaluran dana zakat berisi sumber dan penyaluran jumlah dana kepada pengelola zakat selama jangka waktu yang sudah ditentukan. Zakat berasal dari (*muzakki*) atau wajib zakat yang terdapat dalam entitas syariah dan luar entitas.

Dalam islam sendiri zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam, menurut hukum islam semua muslim harus membayar zakat untuk diserahkan kepada orang yang berhak bila mampu sesuai dengan ketentuan dalam islam. Zakat sendiri berasal dari bahasa arab yang artinya bersih, baik, suci, berkah, atau tumbuh yang bisa diartikan dalam agama islam dengan membayar zakat dapat mensucikan diri dari kejelekan atau kebatilan. Menurut Syurmita & Fircarina (2020) zakat adalah harta yang telah memenuhi syarat yang dikeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kau kerjakan untuk dirimu sendiri kamu akan mendapatkan pahala disisi Allah, sungguh Allah melihat apa yang kamu perbuat”(Al-Quran, n.d.). Al-Baqarah (110)

Menurut penelitian Syurmita & Fircarina (2020) menyatakan bahwa zakat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Nurhayati & Saputri (2021) yang menyatakan bahwa zakat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Penelitian yang dilakukan saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu pada sampel tahun penelitian yang dilakukan, dan variabel yang digunakan. Tahun yang digunakan pada penelitian ini adalah tahun 2018-2020. Tahun tersebut digunakan oleh penulis karena Indonesia pada tahun 2021 memenangkan peringkat 1 pada IFCI dan pada 3 tahun sebelumnya memperlihatkan kenaikan aset perbankan syariah yang signifikan. Sedangkan variabel yang digunakan pada penelitian sebelumnya pengelolaan zakat dan *islamic corporate governance* tidak ada yang menggunakannya secara bersamaan sehingga peneliti melakukan penggabungan variabel dari penelitian sebelumnya berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi “**Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Pengelolaan Zakat Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah berikut ini:

1. Apakah *islamic corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah pengelolaan zakat berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh *islamic corporate governance* terhadap kinerja keuangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengelolaan zakat terhadap kinerja keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat ke berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta gambaran langsung mengenai pengaruh *islamic corporate governance* dan pengelolaan zakat terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh tugas akhir pada Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia.

2. Bagi Penulis Lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi pendukung, rujukan, dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya untuk mengkaji topik yang berkaitan dengan masalah ini bagi penulis lain agar penelitian selanjutnya bisa lebih berkembang.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat berupa ilmu pengetahuan tentang pengaruh *islamic corporate governance* dan pengelolaan zakat terhadap Bank Umum Syariah di Indonesia.

4. Bagi Bank Umum Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Bank Umum Syariah berupa pengetahuan dan masukan tentang seberapa besar pengaruh *islamic corporate governance* dan pengelolaan zakat terhadap kinerja keuangan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas penelitian ini sistematika pembahasan yang akan digunakan adalah:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan penelitian yang dihubungkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang dasar teori yang digunakan, penjelasan variabel yang terkait, penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian yang akan diuji.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, Teknik pengumpulan data, sumber data, definisi dan pengukuran variabel yang digunakan, dan metode analisis data penelitian.

BAB IV Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi penjelasan mengenai analisis yang telah didapatkan yang kemudian hasil analisis dapat diambil kesimpulan yang dapat digunakan sebagai sarana.

BAB V Penutup

Bab ini berisi keterbatasan, kesimpulan, dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stakeholder*

Pihak yang pertama kali menggunakan penyebutan *stakeholder* adalah *Stanford Research Institute* pada tahun 1963 di mana teori tersebut dikembangkan oleh bapak teori *stakeholder* yang bernama R Edward Freeman. Menurut R Edward & John (2001) *stakeholder* adalah pihak-pihak yang memengaruhi atau memberikan pengaruh terhadap kegiatan dari suatu entitas atau perusahaan. Pihak-pihak tersebut di antaranya adalah pemegang saham (*shareholder*), konsumen (pembeli), kreditor, *supplier* (pemasok), pemerintah, karyawan perusahaan, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan, organisasi, atau permasalahan yang sedang dibahas. Dalam teori tersebut dinyatakan bahwa perusahaan bukan suatu entitas yang kegiatannya berjalan hanya untuk kepentingannya sendiri namun juga perusahaan dalam kegiatannya harus memberikan manfaat bagi para *stakeholder*-nya. Dalam teori ini juga menggambarkan bahwa pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan bukan hanya pemegang saham namun juga pihak yang ada di sekeliling perusahaan tersebut.

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan perusahaan, keterbukaan informasi oleh perusahaan digunakan sebagai alat manajemen untuk mengelola kebutuhan informasi bagi *stakeholder* yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Bermula pada sektor swasta karena sektor swasta diasumsikan akan semakin besar dan masyarakat akan sangat terhubung dan memperhatikan perusahaan, oleh sebab itu perusahaan perlu

menunjukkan responsibilitas dan akuntabilitas karena perusahaan akan bertanggung jawab dengan skala yang lebih luas tidak terbatas pada pemilik saham (*shareholder*).

Menurut Bambang dkk (2008) terdapat dua bentuk pendekatan *stakeholder* yaitu *new corporate relation* dan *old corporate relation*. *New corporate relation* berfokus pada kerja sama antara perusahaan dengan semua *stakeholder*-nya. Hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder* eksternal bersifat kemitraan dan fungsional, sedangkan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder* internal berkonsep kebermanfaatan bersama, sehingga aktivitas yang dilakukan organisasi dijalankan tanpa pemisahan diri dari *stakeholder*-nya sehingga terjalin hubungan baik di antara berbagai pihak lain yang memiliki kepentingan, dengan pendekatan ini tujuan perusahaan tidak hanya berorientasi terhadap laba namun lebih kepada pembangunan berkelanjutan. Sedangkan *old corporate relation* berfokus pada bentuk aktivitas individu dan masing-masing fungsi dalam suatu perusahaan, atau organisasi dalam menjalankan aktivitasnya tidak terintegrasi dengan pihak lain atau ada pemisahan antara organisasi dengan *stakeholder* sehingga hanya sebatas melakukan kegiatan transaksi tanpa melihat kepentingan jangka panjang *stakeholder*-nya, ini terjadi karena organisasi memisahkan diri dengan para *stakeholder*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori *stakeholder* adalah suatu teori yang menyatakan bahwa eksistensi, kelangsungan hidup, dan perkembangan suatu perusahaan tidak lepas dari dukungan *stakeholder* hal ini membuktikan bahwa *stakeholder* memegang peran penting dalam perusahaan dan laba hanya dilihat sebagai manfaat ekonomi yang digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan, oleh karena itu kegiatan perusahaan yang berpotensi memberikan dampak bagi *stakeholder* membuat perusahaan perlu berkomitmen untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada *stakeholder*.

Teori *stakeholder* mengacu pada upaya perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan *stakeholder* sehingga mereka dapat terus mempercayai perusahaan, salah satu caranya untuk meningkatkan kredibilitas adalah dengan mempublikasikan laporan tahunan perusahaan yang berisi laporan keuangan untuk publik dan kebijakan-kebijakan lain yang bermanfaat bagi *stakeholder* untuk mengambil keputusan. Entitas yang ditujukan pada penelitian ini adalah bank umum syariah yang ada di Indonesia. Dengan teori *stakeholder* mewajibkan bank umum syariah untuk terus menyajikan laporan *good corporate governance* dan laporan keuangan perusahaan yang dapat bermanfaat bagi *stakeholder* dalam pengambilan keputusan dan menilai kinerja perusahaan. Selain itu dengan teori ini dapat terwujud kinerja keuangan bank umum syariah yang baik karena adanya komitmen kepada *stakeholder*-nya. Kinerja keuangan bank umum syariah dapat tercermin melalui laporan tahunan yang berisi laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bank umum syariah. *Islamic corporate governance* yang ideal menurut prinsip ekonomi islam dapat dikembangkan dari teori *stakeholder* yang menopang kepentingan seluruh *stakeholder* secara adil. Fokus perhatian *islamic corporate governance* adalah menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang merangkul semua pihak *stakeholder* perusahaan dalam memperoleh hak atas perusahaan dan dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu teori *stakeholder* menjadi landasan pelaksanaan CSR salah satunya dengan pelaksanaan aktivitas yang bermanfaat bagi *stakeholder* yaitu zakat, dengan melaksanakan zakat perusahaan dapat memenuhi keperluan bagi yang membutuhkan, sesuai dengan ajaran islam bahwa manusia dalam keberadaannya harus bermanfaat bagi manusia lain.

2.1.2 Kinerja Keuangan

Bank umum syariah adalah bank yang dalam kegiatan usahanya mengikuti prinsip syariah dalam memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran. Selaras dengan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip hukum yang ada dalam islam yang sudah diatur dalam fatwa MUI seperti prinsip kemaslahatan, keadilan dan keseimbangan, serta universalisme yang tidak mengandung riba, gharar, zalim, dan objek yang haram (Rakyat, 2008). Selain itu perbankan syariah juga diamanahkan untuk melaksanakan tugas sosial yaitu menerima dana zakat, sedekah, hibah, infak, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya pada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi dana sosial. Seperti halnya perusahaan lain yang berorientasikan bisnis, bank umum syariah juga diharapkan untuk selalu menghasilkan kinerja yang baik sebab untuk mengukur hasil yang telah dilaksanakan dari program-program yang dimiliki oleh perusahaan dalam menjalankan sesuai tujuan organisasinya dapat diukur melalui kinerja.

Kinerja adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu perusahaan yang sesuai dengan tanggungjawab dan wewenang masing-masing untuk mencapai tujuan perusahaan secara legal tanpa melanggar hukum dan tanpa bertentangan dengan moral dan etika (Zara & Erinoss, 2020). Pengukuran kinerja secara luas dibagi menjadi dua yaitu pengukuran keuangan dan pengukuran non keuangan, kinerja non keuangan adalah ukuran kinerja dengan informasi non keuangan yang lebih difokuskan pada kualitas layanan pelanggan, sedangkan kinerja keuangan adalah ukuran kinerja dengan penggunaan informasi keuangan untuk mengukur kinerja perusahaan (Hisamuddin & Tirta K, 2015)

Kinerja perusahaan merupakan tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan program program yang dimiliki perusahaan untuk mewujudkan tujuan tujuan yang dimiliki dan

dengan strategi yang sudah direncanakan. Kinerja perusahaan dapat menggambarkan keadaan atau kemampuan sebenarnya dari sebuah perusahaan untuk meraih tujuannya melalui penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Dengan pengukuran kinerja perusahaan, akan menghasilkan informasi yang mana nantinya dapat dijadikan informasi untuk merencanakan strategi perusahaan, pengambilan keputusan, dan kebijakan manajemen terkait dengan tujuan perusahaan bagi periode selanjutnya. Pengukuran kinerja bank sangat penting bagi seluruh *stakeholder* bank, bank yang selalu dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dan mampu membayar dividen dengan baik prospek bisnisnya akan dapat selalu berkembang (Hisamuddin & Tirta K, 2015).

Metode penilaian kinerja ditetapkan menurut peraturan BI (PBI) No.9 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (Indonesia, 2007) . Di antaranya adalah sebagai berikut :

1) Kualitas aset

Metode penilaian kualitas aset bertujuan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi risiko gagal bayar. Penilaian ini dilakukan dengan melalui kualitas aktiva produktif dan pembiayaan *Non-Performing*.

2) Likuiditas

Metode penilaian likuiditas bertujuan untuk menilai kemampuan bank mempertahankan tingkat likuiditas yang mencukupi termasuk antisipasi risiko likuiditas di masa yang akan datang. Dalam penilaian ini dapat diketahui kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban agunan dan tunainya. Penilaian ini dilakukan dengan melalui Rasio Antar Bank Pasiva, *Short Term Mismatch Plus*, dan *Short Term Mismatch*.

3) Rentabilitas

Metode penilaian rentabilitas bertujuan untuk menilai kemampuan bank dalam mencari keuntungan atau laba. Penilaian ini dilakukan dengan melalui *Net Operating Margin*, Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional, Diversifikasi Pendapatan, Komposisi Penempatan Dana pada Surat Berharga, *Return on Equity*, dan *Return on Asset*.

Penelitian ini dalam melakukan pengukuran kinerja perusahaan menggunakan analisis *Return On Asset*. Analisis *Return On Asset* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank (Rhamadhani, 2016). ROA merupakan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan total aset dalam periode tersebut.

2.1.3 Islamic Corporate Governance

Teori tata kelola perusahaan dilakukan oleh Adam Smith pada tahun 1776 dengan konsep *division of labor*. Konsep *division of labor* menyebutkan bahwa organisasi bisnis membutuhkan spesialisasi fungsional untuk mencapai tujuannya secara efisien (Nunung & Sri, 2014). Dari konsep tersebut terdapat beberapa definisi tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengontrol bagaimana suatu organisasi diarahkan, dikendalikan, dan dimintai pertanggung jawaban oleh pemegang saham (*shareholder*) dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) (Nunung & Sri, 2014). Tujuan diterapkan konsep *corporate governance* adalah pengelolaan perusahaan yang transparan bagi seluruh pengguna laporan keuangan atau *transparency*. Sehingga dengan *transparency* tersebut diharapkan pertumbuhan ekonomi perusahaan terus mengalami peningkatan yang akhirnya dapat terbentuk kondisi yang saling menguntungkan dan terciptalah konsep penerapan *corporate governance* yang baik atau *good corporate governance*.

Pelaksanaan kegiatan perbankan akan selalu berhubungan langsung dengan pemangku kepentingan sehingga perlu adanya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (Padli dkk, 2019). *Good Corporate Governance* adalah tata kelola perusahaan yang baik yang mengimplementasikan prinsip *accountability*, *transparency*, dan *responsibility* dalam pelaksanaannya.

Prinsip *Good Corporate Governance* dijelaskan oleh Badan Nasional Kebijakan *Corporate Governance* dalam buku Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia.

1. Akuntabilitas (*accountability*)

Bank memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan aktivitasnya oleh pengelola bank, setiap melaksanakan kegiatannya harus sesuai dengan visi dan misi bank, sehingga tercipta rasa percaya dan rasa aman bagi *stakeholder*.

2. Keterbukaan (*transparency*)

Keterbukaan adalah dasar yang digunakan oleh bank untuk memberikan informasi yang sesuai, informasi yang diberikan kepada *stakeholder* berisi visi dan misi, kondisi sebenarnya bank saat ini hingga rencana-rencana yang akan dilakukan di masa depan, pengelola organisasi, laporan keuangan, dan lain sebagainya.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Pelaksanaan tanggung jawab adalah bentuk kepatuhan dalam menjalankan peraturan yang berlaku, tujuan pelaksanaan tanggung jawab adalah untuk menjaga kelangsungan bank dalam pelaksanaan usahanya. Bank yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya atau melakukan *corporate social responsibility* adalah perwujudan bank yang baik.

4. Independensi (*independency*)

Independensi mengharuskan bank dalam melaksanakan kegiatannya tidak terpengaruh oleh siapapun dan tidak terdapat dominasi oleh pihak manapun sehingga dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan prinsip objektivitas tanpa tekanan dari pihak lain.

5. Kewajaran (*fairness*)

Penerapan prinsip kewajaran bertujuan untuk memperhatikan hak setiap pemangku kepentingan secara adil yang artinya bank harus memberikan kesempatan yang sama tanpa melihat kepentingan yang ada.

Tata kelola perusahaan islam atau *islamic corporate governance* dalam beberapa hal mirip dengan tata kelola perusahaan konvensional seperti pengawasan dan kontrol perusahaan, namun pengenalan nilai islam dan norma islam membuat karakteristiknya berbeda (Ajili & Bouri, 2018). Bermodal konsep *good corporate governance, islamic corporate governance* memiliki tujuan yang lebih dari sekedar menjalankan peraturan, *islamic corporate governance* lebih menekankan pada pengelolaan bisnis berdasar prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Sedangkan prinsip-prinsip akuntabilitas, keterbukaan, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran merupakan prinsip *universal*, oleh karena itu dapat *disimpulkan islamic corporate governance* tidak hanya bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan nilai tambah bagi *stakeholder* dan *shareholder* tetapi mengacu pada prinsip islam untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengelola bisnis (Mardiani et al., 2019). Perbankan syariah merupakan contoh perusahaan yang menerapkan konsep *corporate governance* dalam islam, yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur *corporate governance*-nya. Sesuai dengan PBI No.11/33/2009 Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas memberikan saran dan

nasihat kepada direksi serta mengawasi jalannya kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (Indonesia, 2009).

Komite Nasional Kebijakan *Governance* mengeluarkan ketentuan yang mengatur *Good Governance Bisnis Syariah* pada tahun 2011. Dalam pedoman tersebut dijelaskan indikator dalam menilai pengaplikasian *islamic corporate governance*. Berikut indikator *Good Governance* Bisnis Syariah:

Tabel 2.1 Indikator *Good Governance* Bisnis Syariah

No.	Indikator
1	Pernyataan bahwasannya bank sudah menerapkan ICG pada laporan tahunan yang telah di publikasi
2	Pengungkapan aspek yang belum terlaksana beserta alasannya
3	Terdapat nama dewan komisaris dan statusnya (komisaris independen atau komisaris bukan independen)
4	Penjelasan tugas dan fungsi dewan komisaris
5	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan komisaris serta jumlah kehadiran anggota saat rapat
6	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri atau <i>self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan komisaris
7	Pengungkapan nama anggota komite
8	Penjelasan mekanisme dan fungsi komite

9	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan komite serta jumlah kehadiran anggota saat rapat
10	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas komite
11	Melampirkan laporan tugas komite
12	Terdapat nama anggota dewan pengawas syariah
13	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan pengawas syariah serta jumlah kehadiran anggota saat rapat
14	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri atau <i>self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan pengawas syariah
15	Pengungkapan nama dan jabatan direksi serta fungsi
16	Penjelasan mekanisme kerja direksi (pengambilan keputusan & pendelegasian wewenang)
17	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan direksi serta jumlah kehadiran anggota saat rapat
18	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas direksi
19	Penjelasan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal (audit internal dan pengendalian risiko serta sistem pengawasan)
20	Pengungkapan visi, misi dan nilai perusahaan
21	Pengungkapan pemilik mayoritas

22	Pengungkapan investor berbasis profit and loss sharing (pembagian laba dan rugi)
23	Kebijakan dan remunerasi direksi, dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris
24	Menyebutkan transaksi dengan pihak yang mempunyai benturan kepentingan
25	Hasil penilaian implementasi icg dilaporkan pada rapat umum tahunan pemilik
26	Mengungkapkan kejadian luar biasa yang terjadi di perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan
27	Melaksanakan zakat dan <i>pelaksanaan corporate social responsibility</i>
28	Pelaksanakan kewajiban sebagai penerima dan penyalur dana zakat, infak, sadaqah, dan wakaf
29	Terdapat kebijakan yang memastikan fungsi setiap organ perusahaan terlaksana secara efektif
30	Terdapat kebijakan yang memastikan akuntabilitas, pengendalian internal secara efektif, dan pelaporan keuangan yang benar terlaksana dengan baik

31	Mengungkapkan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan operasional yang terkait penerapan skema bagi hasil dan skema syariah lainnya
32	Pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan yang berdasar pada nilai perusahaan dan etika bisnis
33	Fasilitas bagi pemegang saham dan <i>stakeholder</i> berupa informasi yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian
34	Kebijakan untuk menyempurnakan peraturan perusahaan untuk memenuhi prinsip ICG
35	Kebijakan untuk menilai pelaksanaan ICG bagi pelaksana bisnis syariah
36	Menyelaraskan pemahaman dan kepedulian seluruh anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan dewan direksi, pemegang saham, dan seluruh karyawan terhadap ICG dan berkomitmen untuk melaksanakannya
37	Melakukan kajian pelaksanaan ICG yang berkaitan dengan kondisi perusahaan dan melakukan tindakan korektif bila diperlukan
38	Penyusunan pedoman dan program pelaksanaan ICG
39	Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan ICG bagi seluruh pihak di dalam perusahaan serta pemahaman atas

	pelaksanaan pedoman ICG dalam kegiatan perusahaan sehingga tercipta rasa memiliki
40	Melaksanakan penilaian sendiri atau jasa pihak luar (independen) untuk memastikan penerapan ICG berjalan terus menerus, hasil penilaian diungkapkan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan
41	Memberikan informasi bagi <i>stakeholder</i> untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan ICG
42	Mempraktikkan etika bisnis syariah dengan konsisten sehingga dapat mewujudkan bisnis yang sehat, transparan, efisien, dan islami
43	Mematuhi setiap ketentuan dan ketentuan syariah dalam bisnis, dengan halal dan baik (<i>thayyib</i>) dari segi sebenarnya (<i>dzat</i>) ataupun caranya
44	Melaksanakan kegiatan dalam perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
45	Menggunakan aturan perundang undangan dalam membentuk aturan spesifik dalam organisasi atau manajemen dalam perusahaan
46	Menggunakan asas ICG untuk meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja secara terus menerus

47	Menerapkan fungsi ombudsman yang berfungsi untuk menampung informasi tentang kemungkinan adanya penyimpangan dalam perusahaan
----	---

Sumber : (Governance, 2011)

2.1.4 Pengelolaan Zakat

Zakat berasal dari kata arab yang artinya sesuatu yang tumbuh, meningkat, berkah, kebersihan, dan perbaikan (Rosman dkk, 2019). Pada dasarnya dari seluruh arti kata dari zakat mempunyai makna yang sama dan dapat diartikan dengan zakat menjadikan manusia menjadi lebih baik dengan membersihkan atau memurnikan pendapatannya atau kekayaannya untuk mendapatkan berkah dalam hidupnya. Zakat dari perspektif syariah memiliki arti sebagai sebagian dari kekayaan yang telah ditentukan oleh Allah untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Berdasarkan Q.S At-Taubah ayat 60 ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat (Quran, n.d.-a). Di antaranya yaitu adalah:

1. *Ibnu sabil*, orang yang kehabisan biaya di wilayah orang lain dalam perjalanan kembali ke tanah air.
2. *Fisabilillah*, orang yang berjuang di jalan Allah (jihad, berperang membela agama Allah).
3. *Gharimin*, orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup, sudah tidak sanggup melunasi hutangnya.
4. *Riqab*, budak yang dapat dibebaskan oleh tuannya jika melunasi biaya pembebasannya.
5. *Mualaf*, orang yang baru masuk islam, sebagai sarana dakwah untuk menarik simpati yang belum beragama islam.

6. *Amil*, orang yang mengumpulkan, menyimpan, mencatat, menjaga, dan menyalurkan zakat.
7. *Fakir*, orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
8. *Miskin*, orang yang mempunyai harta namun belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pokoknya.

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang harus dibayarkan jika memiliki harta dengan nominal tertentu dan telah mencapai batas minimal harta yang harus dizakati. Zakat sebagai alat sirkulasi kekayaan yang mengurangi kesenjangan ekonomi dengan cara mencegah masyarakat yang miskin menjadi lebih miskin lagi, dan dalam konteks perbankan syariah membayar zakat atas nama pemilik yang merupakan pemegang saham umat islam diharapkan dapat meningkatkan berkah dalam bisnis dan memberikan nilai kepada para *stakeholder* (Rosman dkk, 2019). Melalui pengelolaan zakat di antaranya penghimpunan dana zakat, administrasi zakat bagi *muzakki*, dan pendistribusian/penyaluran dana zakat bank syariah dapat memberikan manfaat langsung kepada lingkungan di sekitar perusahaan dan jika bank melaksanakan pengelolaan zakat maka perusahaan akan lebih diterima dan diakui oleh masyarakat. Dengan pengakuan tersebut kinerja bank syariah dapat meningkat karena kepercayaan masyarakat terhadap bank, sehingga keberlangsungan hidup bank akan terjamin dan kepercayaan akan meningkat.

Macam- macam zakat menurut Sri & Susminingsih (2017) zakat adalah sedekah wajib yang telah ditentukan jenis dan tipenya dalam ilmu fikih yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

1. Zakat *Fitr*

Zakat yang dikeluarkan setiap umat muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang solat idul fitri atau zakat fitrah yang dibayarkan setahun sekali berupa beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg.

2. Zakat *Maal*

Zakat harta kekayaan yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum dengan ketentuan telah memenuhi batas minimal harta yang harus dizakati dan telah dimiliki selama satu tahun.

Zakat dapat menjadi pemerataan pendapatan dan meningkatkan permintaan agregat pada kerangka islam yang menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi, zakat menjadi metode efektif dalam pembangunan berkelanjutan melalui kenaikan aktivitas ekonomi dan penurunan masalah sosial (Nurhayati & Saputri, 2021). Zakat merupakan bagian dari *corporate social responsibility* yang sangat erat dengan kegiatan perusahaan syariah, di mana perusahaan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak semata mata hanya untuk menghasilkan laba namun segala aspek harus diperhatikan baik itu internal maupun eksternal. Bank umum syariah yang bergerak pada bidang jasa keuangan syariah sudah sewajarnya membayar zakat sesuai aturan perundang undangan dan sesuai aturan islam agar mendapat berkah dan kemaslahatan tercapai (Rhamadhani, 2016). Menurut UU No. 17 Tahun 2000 zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat namun tidak terbebani secara berlebihan (Rakyat, 2000).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Rhamadhani (2016) bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh zakat terhadap kinerja perusahaan pada bank syariah di Indonesia. Populasi penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia tahun 2011, 2012, dan 2013 yang menerbitkan laporan tahunan lengkap pada tahun 2011, 2012, dan

2013. Pengambilan data diperoleh dari *website* masing - masing bank umum syariah di Indonesia. Hasil pengujian menunjukkan zakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Satu tahun kemudian, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Sri & Susminingsih (2017) bertujuan untuk mengetahui pengaruh alokasi dana zakat terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. Populasi penelitian ini adalah bank syariah yang menerbitkan laporan keuangan dan memiliki laporan sumber dan penggunaan dana zakat dari tahun 2013-2016. Pengambilan data diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdapat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan penelitian ilmiah, jurnal penelitian ilmiah, dan *website* masing-masing bank syariah. Hasil pengujian menunjukkan zakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Dua tahun kemudian, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Rosman dkk (2019) bertujuan untuk mengetahui dampak *corporate social responsibility* khususnya pada penerapan kontribusi zakat oleh bank syariah terhadap kinerja keuangan. Populasi penelitian ini adalah 15 bank syariah pada tahun 2011-2018. Pengambilan data diperoleh dari *Fitch Connect* dan laporan tahunan masing-masing bank syariah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kontribusi zakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Di tahun yang sama terdapat penelitian yang dilakukan oleh Khan & Zahid (2019) bertujuan untuk mengetahui dampak syariah dan tata kelola perusahaan terhadap kinerja bank syariah di Asia. Populasi penelitian ini adalah 79 bank syariah dari 19 negara Asia periode tahun 2011-2016. Pengambilan data diperoleh menggunakan kumpulan data unik yang dikumpulkan dengan tangan pada variabel tata kelola

perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ICG berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja bank syariah.

Di tahun berikutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Aslam & Haron (2020) bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme *corporate governance* memengaruhi kinerja bank syariah. Populasi penelitian ini adalah 29 negara islam (timur tengah, asia selatan, dan asia tenggara) periode tahun 2008-2017. Pengambilan data diperoleh menggunakan data bank yang terdaftar dalam database *Bank Scope* yang mencakup. Hasil pengujian menunjukkan komite audit dan dewan syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Ukuran dewan dan komite manajemen risiko berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Dualitas CEO dan direktur non-eksekutif memiliki hubungan yang beragam dengan kinerja keuangan bank syariah.

Di tahun yang sama terdapat penelitian yang dilakukan oleh Zara & Erinoss (2020) bertujuan untuk mengetahui pengaruh *islamic corporate governance* dan *islamic corporate social responsibility* terhadap kinerja perbankan syariah. Populasi penelitian ini adalah 14 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari periode tahun 2012-2018 dan menyajikan *annual report* serta mengungkapkan laporan CSR. Pengambilan data diperoleh menggunakan laporan tahunan yang dipublikasikan oleh masing-masing bank pada *website*-nya. Hasil pengujian menunjukkan *islamic corporate governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. *Islamic corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Masih di tahun yang sama terdapat penelitian yang dilakukan oleh Syurmita & Fircarina (2020) bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat, *islamic corporate social responsibility* dan *good governance* bisnis syariah terhadap reputasi dan kinerja bank

umum syariah di Indonesia. Populasi penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada periode tahun 2014-2018. Pengambilan data diperoleh menggunakan laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan di situs resmi perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan zakat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah, *islamic corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah, dan *good governance* bisnis syariah terhadap reputasi dan kinerja perusahaan tidak ditemukan dalam penelitian ini.

Di tahun berikutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati & Saputri (2021) bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat dan *islamic social reporting* pada kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. Populasi penelitian ini adalah bank syariah yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* dari tahun 2015-2019. Pengambilan data diperoleh menggunakan data *annual report* yang dipublikasikan dari *website* masing-masing bank. Hasil pengujian menunjukkan zakat tidak berpengaruh pada kinerja keuangan dan *islamic social reporting* berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan.

Di tahun yang sama terdapat penelitian yang dilakukan oleh Kholilah & Wirman (2021) bertujuan untuk mengetahui pengaruh *intellectual capital* dan *islamic corporate governance* terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia. Populasi penelitian ini adalah 11 bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun periode 2017-2019. Pengambilan data diperoleh menggunakan data *annual report* yang dipublikasikan di masing-masing *website* resmi bank. Hasil pengujian menunjukkan *Islamic corporate governance* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah dan *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Masih di tahun yang sama terdapat penelitian yang dilakukan oleh Wardiwyono & Jayanti (2021) bertujuan untuk mengetahui peran *islamic corporate social responsibility* dalam memoderasi pengaruh zakat terhadap kinerja bank umum syariah. Populasi penelitian ini adalah lima bank yang dalam laporan tahunannya menerbitkan laporan sumber dan penyaluran dana zakat yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada periode tahun 2012-2017. Pengambilan data diperoleh menggunakan laporan tahunan yang diterbitkan dan dikumpulkan melalui dokumentasi. Hasil pengujian menunjukkan besarnya zakat perusahaan yang dilaporkan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah, *islamic corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah, dan *peran islamic corporate social responsibility* dalam memoderasi pengaruh zakat terhadap kinerja keuangan bank syariah dikonfirmasi.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis Penelitian Terdahulu	Variabel penelitian	Kesimpulan
1.	Rhamadhani (2016)	Dependen : Kinerja perusahaan (studi empiris pada bank umum syariah). Independen: Zakat.	Zakat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah.
2.	Sri & Susminingsih (2017)	Dependen : Kinerja keuangan bank syariah. Independent: Zakat.	Alokasi dana zakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah.
3.	Rosman dkk (2019)	Dependen: Kinerja keuangan bank syariah di Malaysia. Independen: Dampak kontribusi zakat.	Kontribusi zakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah.

4.	Khan & Zahid (2019)	<p>Dependen : Kinerja keuangan bank syariah di Asia.</p> <p>Independen : Syariah dan tata kelola perusahaan.</p>	ICG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah.
5.	Aslam & Haron (2020)	<p>Dependen : Kinerja keuangan bank syariah.</p> <p>Independen : Tata kelola perusahaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite audit dan dewan syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. 2. Ukuran dewan dan komite manajemen risiko berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah. 3. Dualitas CEO dan direktur non-eksekutif memiliki hubungan yang beragam dengan kinerja keuangan bank syariah.
6.	Zara & Erinos (2020)	<p>Dependen : Kinerja keuangan bank syariah.</p> <p>Independen: <i>Islamic corporate governance</i> dan <i>islamic corporate social responsibility</i>.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Islamic corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. 2. <i>Islamic corporate social responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah.
7.	Syurmita & Fircarina (2020)	<p>Dependen: Kinerja keuangan bank syariah.</p> <p>Independen: Zakat, <i>islamic corporate social responsibility</i>, dan penerapan <i>good governance</i> bisnis syariah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. 2. <i>Islamic corporate social responsibility</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. 3. <i>Good governance</i> bisnis syariah terhadap reputasi dan kinerja perusahaan tidak

			ditemukan dalam penelitian ini.
8.	Nurhayati & Saputri (2021)	<p>Dependen: Kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia.</p> <p>Independen: Zakat dan <i>islamic social reporting</i></p>	<p>1. Zakat tidak berpengaruh pada kinerja keuangan</p> <p>2. <i>Islamic social reporting</i> berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan</p>
9.	Kholilah & Wirman (2021)	<p>Dependen: Kinerja keuangan bank syariah.</p> <p>Independen: <i>Intellectual capital</i> dan <i>islamic corporate governance</i>.</p>	<p>1. <i>Islamic corporate governance</i> berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah.</p> <p>2. <i>Intellectual capital</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah.</p>
10.	Wardiyono & Jayanti (2021)	<p>Dependen : Kinerja keuangan bank syariah.</p> <p>Independen: Peran <i>islamic corporate social responsibility</i> dalam memoderasi pengaruh zakat.</p>	<p>1. Besarnya zakat perusahaan yang dilaporkan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah.</p> <p>2. <i>Islamic corporate social responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah.</p> <p>3. Peran <i>islamic corporate social responsibility</i> dalam memoderasi pengaruh zakat terhadap kinerja keuangan bank syariah dikonfirmasi.</p>

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Kinerja keuangan bank umum syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah *islamic corporate governance*. Sistem keuangan perusahaan yang stabil dan sehat tergantung pada organisasi yang dapat menjaga kepercayaan *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Dalam *islamic corporate governance* kepercayaan pemangku kepentingan dapat dicapai dengan melindungi kepentingan *stakeholder* dengan melaksanakan kegiatan usahanya berdasar prinsip *fairness*, *transparency*, dan *accountability* kepada seluruh bagian dari perusahaan yang memiliki kepentingan langsung terhadap perusahaan atau tidak langsung memiliki kepentingan dengan perusahaan (Khan & Zahid, 2019). Menurut Zara & Erinoss (2020) *islamic corporate governance* adalah model *good corporate governance* yang proses tata kelola dan strukturnya melindungi kepentingan dan hak seluruh *stakeholder*.

Selaras dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan bukan suatu entitas yang berjalan untuk kepentingannya sendiri tetapi juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya. Menurut Nova (2018) teori *stakeholder* merupakan landasan pengembangan *islamic corporate governance* karena teori *stakeholder* mengakomodasi kepentingan secara adil bagi seluruh pemangku kepentingan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Zara & Erinoss, 2020) membuktikan bahwa *islamic corporate governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan *islamic corporate governance* dalam bank syariah maka akan meningkatkan kinerja keuangan, sebaliknya jika penerapan *islamic corporate governance* dilaksanakan dengan tidak maksimal maka akan menurunkan kinerja keuangan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kholilah & Wirman (2021) membuktikan hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini membuktikan bahwa *islamic corporate governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa hasil penelitian yang negatif bukan berarti ICG berpengaruh negatif dengan kinerja secara operasional karena indikator kualitas penerapan ICG adalah yang nilainya mendekati angka 1.

Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan penelitian ulang untuk mengetahui pengaruh *islamic corporate governance* dengan kinerja keuangan bank umum syariah.

H1: *Islamic Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

2.3.2 Pengaruh Pengelolaan Zakat terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Zakat dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi perbankan syariah dan dapat memberikan kontribusi kepada perekonomian dengan pengurangan tingkat kemiskinan. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat digambarkan dengan bentuk menyajikan informasi keuangan atau non-keuangan yang berhubungan dengan organisasi dari lingkungan fisik atau sosialnya (Syurmita & Fircarina, 2020).

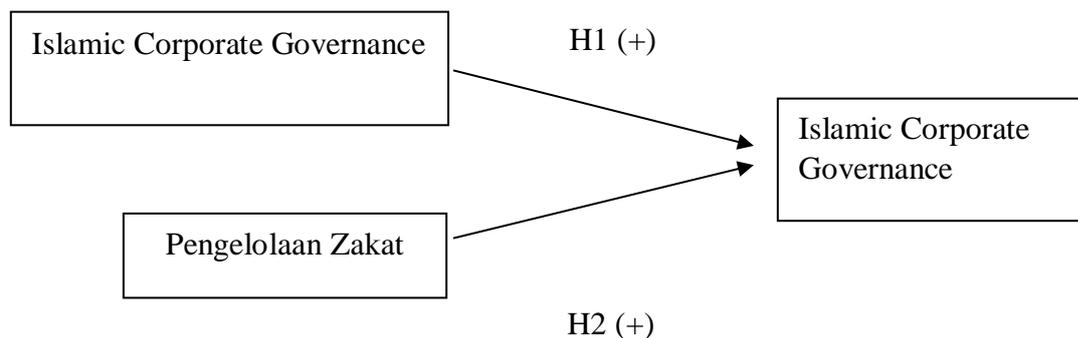
Pengelolaan zakat yang transparan, baik, dan bertanggung jawab dapat membantu mengurangi masalah sosial dan ekonomi, selain itu pembayaran zakat yang diwajibkan atas badan usaha tidak dimaksudkan untuk membebani dan mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. Dengan pengelolaan zakat bank syariah dapat memberikan manfaat langsung bagi lingkungan dan perusahaan lebih diterima oleh masyarakat, dengan itu kinerja bank dapat meningkat selaras dengan meningkatnya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri & Susminingsih (2017) membuktikan bahwa zakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengelolaan zakat yang dilakukan maka semakin tinggi kinerja keuangan perbankan syariah, sebaliknya jika pengelolaan zakat semakin buruk maka semakin rendah kinerja keuangan perbankan syariah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati & Saputri (2021) membuktikan hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini membuktikan bahwa zakat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Dalam penelitian ini menyebutkan pengelolaan zakat tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang kemungkinan disebabkan oleh zakat yang disalurkan lebih kecil dari zakat yang diterima BAZNAS atau LAZNAS.

Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan penelitian ulang untuk mengetahui pengaruh zakat dengan kinerja keuangan bank umum syariah.

H2: Pengelolaan zakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah.



Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* atau pemilihan sampel dengan tujuan atau pertimbangan tertentu. Sampel yang diambil harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bank umum syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2018-2020.
2. Bank umum syariah yang menerbitkan *annual report* selama tiga tahun berturut turut yang memiliki laporan keuangan.
3. Bank umum syariah yang menerbitkan *annual report* selama tiga tahun berturut turut yang memiliki laporan *good corporate governance*.

Atas dasar kriteria di atas diperoleh sampel sebagai berikut: (Daftar nama Bank Umum Syariah terdapat dalam *website* resmi (OJK, 2018, 2019, 2020).

Tabel 3.1 Daftar Nama Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah
1. PT. Bank Aceh Syariah
2. PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3. PT. Bank Muamalat Indonesia
4. PT. Bank Victoria Syariah
5. PT. Bank BRI Syariah

6. PT. Bank Jabar Banten Syariah
7. PT. Bank BNI Syariah
8. PT. Bank Syariah Mandiri
9. PT. Bank Mega Syariah
10. PT. Bank Panin Dubai Syariah
11. PT. Bank Syariah Bukopin
12. PT. BCA Syariah
13. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14. PT. Maybank Syariah Indonesia

Setelah adanya proses penentuan sampel dengan kriteria yang sudah disebutkan di atas maka diperoleh sampel sebanyak 14 Bank Umum Syariah.

3.2 Teknik dan Pengumpulan Data

Jenis penelitian kuantitatif dilakukan dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang diperoleh baik secara lisan atau tertulis yang diperoleh melalui sumber lain. Data yang digunakan bersumber dari *annual report* perusahaan yang dipublikasikan di *website* masing-masing bank umum syariah yang diteliti. Data penelitian yang digunakan yaitu laporan keuangan dan laporan *good corporate governance* bank umum syariah sesuai dengan kriteria yang digunakan dan telah dipublikasikan oleh *website* masing-masing bank umum syariah pada periode 2018-

2020. Selain data di atas, peneliti menggunakan data lain sebagai penunjang penelitian seperti jurnal dan skripsi yang relevan dengan penelitian.

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel

Untuk memberikan gambaran dan memudahkan penelitian yang dilakukan oleh sebab itu perlu memberikan definisi tiap variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan dua variabel independen.

3.3.1 Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian adalah kinerja keuangan, maka proksinya atau cara pengukurannya dengan menggunakan ROA.

ROA atau *return on assets* adalah salah satu jenis rasio profitabilitas yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari aset yang digunakan.

Semakin besar ROA maka semakin baik pula aset perusahaan dalam memperoleh laba.

Rumus yang digunakan untuk menghitung ROA yaitu:

$$ROA = \frac{LABA\ BERSIH}{TOTAL\ ASET}$$

3.3.2 Islamic Corporate Governance

Cara untuk menilai sejauh mana Bank Umum Syariah di Indonesia menerapkan *Islamic Corporate Governance* dengan baik adalah dengan menggunakan pedoman umum *Good Governance* Bisnis Syariah yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2011). Indikator-indikator tersebut ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Indikator Good Governance Bisnis Syariah

No.	Indikator	2018	2019	2020
1.	Pernyataan bahwasannya bank sudah menerapkan ICG pada laporan tahunan yang telah di publikasi			
2.	Pengungkapan aspek yang belum terlaksana beserta alasannya			
3.	Terdapat nama dewan komisaris dan statusnya (komisaris independen atau komisaris bukan independen)			
4.	Penjelasan tugas dan fungsi dewan komisaris			
5.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan komisaris serta jumlah kehadiran anggota saat rapat			
6.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri <i>atau self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan komisaris			
7.	Pengungkapan nama anggota komite			
8.	Penjelasan mekanisme dan fungsi komite			
9.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan komite serta jumlah kehadiran anggota saat rapat			
10.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas komite			

11.	Melampirkan laporan tugas komite			
12.	Terdapat nama anggota Dewan Pengawas Syariah			
13.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan pengawas syariah serta jumlah kehadiran anggota saat rapat			
14.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri atau <i>self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan pengawas syariah			
15.	Pengungkapan nama dan jabatan direksi serta fungsi			
16.	Penjelasan mekanisme kerja direksi (pengambilan keputusan & pendelegasian wewenang)			
17.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan direksi serta jumlah kehadiran anggota saat rapat			
18.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas direksi			
19.	Penjelasan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal (audit internal dan pengendalian risiko serta sistem pengawasan)			
20.	Pengungkapan visi, misi dan nilai perusahaan			
21.	Pengungkapan pemilik mayoritas			

22.	Pengungkapan investor berbasis <i>profit and loss sharing</i> (pembagian laba dan rugi)			
23.	Kebijakan dan remunerasi direksi, dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris			
24.	Menyebutkan transaksi dengan pihak yang mempunyai benturan kepentingan			
25.	Hasil penilaian implementasi icg dilaporkan pada rapat umum tahunan pemilik			
26.	Mengungkapkan kejadian luar biasa yang terjadi di perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan			
27.	Melaksanakan zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>			
28.	Melaksanakan kewajiban sebagai penerima dan penyalur dana zakat, infak, sadaqah, dan wakaf			
29.	Terdapat kebijakan yang memastikan fungsi setiap organ perusahaan terlaksana secara efektif			
30.	Terdapat kebijakan yang memastikan akuntabilitas, pengendalian internal secara efektif, dan pelaporan keuangan yang benar terlaksana dengan baik			

31.	Mengungkapkan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan operasional yang terkait penerapan skema bagi hasil dan skema syariah lainnya			
32.	Pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan yang berdasar pada nilai perusahaan dan etika bisnis			
33.	Fasilitas bagi pemegang saham dan stakeholder berupa informasi yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian			
34.	Kebijakan untuk menyempurnakan peraturan perusahaan untuk memenuhi prinsip ICG			
35.	Kebijakan untuk menilai pelaksanaan ICG bagi pelaksana bisnis syariah			
36.	Menyelaraskan pemahaman dan kepedulian seluruh anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan dewan direksi, pemegang saham, dan seluruh karyawan terhadap ICG dan berkomitmen untuk melaksanakannya			
37.	Melakukan kajian pelaksanaan ICG yang berkaitan dengan kondisi perusahaan dan melakukan tindakan korektif bila diperlukan			
38.	Penyusunan pedoman dan program pelaksanaan ICG			

39.	Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan ICG bagi seluruh pihak di dalam perusahaan serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman ICG dalam kegiatan perusahaan sehingga tercipta rasa memiliki			
40.	Melaksanakan penilaian sendiri atau jasa pihak luar (independen) untuk memastikan penerapan ICG berjalan terus menerus, hasil penilaian diungkapkan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan			
41.	Memberikan informasi bagi stakeholder untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan ICG			
42.	Mempraktikkan etika bisnis syariah dengan konsisten sehingga dapat mewujudkan bisnis yang sehat, transparan, efisien, dan islami			
43.	Mematuhi setiap ketentuan dan ketentuan syariah dalam bisnis, dengan halal dan baik (thayyib) dari segi sebenarnya (dzat) ataupun caranya			
44.	Melaksanakan kegiatan dalam perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku			
45.	Menggunakan aturan perundang undangan dalam membentuk aturan spesifik dalam organisasi atau manajemen dalam perusahaan			

46.	Menggunakan asas ICG untuk meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja secara terus menerus			
47.	Menerapkan fungsi ombudsman yang berfungsi untuk menampung informasi tentang kemungkinan adanya penyimpangan dalam perusahaan			

Dengan 47 indikator-indikator di atas peneliti kemudian memberikan penilaian atas penerapan *islamic corporate governance* dalam Bank Umum Syariah di Indonesia yang dilaporkan pada *annual report* (laporan tahunan), dengan cara apabila BUS melaksanakan indikator tersebut maka akan diberi skor satu (1) pada tabel. Apabila BUS tidak melaksanakan indikator maka akan diberi skor nol (0).

3.3.3 Pengelolaan Zakat

Cara untuk menilai pengelolaan zakat pada bank umum syariah adalah dengan menggunakan data pada *annual report* (laporan tahunan perusahaan), dilihat apakah BUS melaksanakan zakat dan melakukan tugasnya sebagai penerima dan penyalur zakat yang dilihat pada laporan laba rugi atau laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Pengelolaan zakat dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy, ketika BUS melaksanakan pengelolaan zakat maka akan diberi skor satu (1) dan apabila BUS tidak melaksanakan pengelolaan zakat maka akan diberi skor nol (0).

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan program IBM SPSS Statistik versi 25. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda *atau multiple regression*

analysis, metode ini digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan apakah terdapat pengaruh atau tidak dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara bersamaan (Imam, 2013). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas (X) memengaruhi variabel terikat (Y).

Persamaan analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y: Kinerja perusahaan

X1: *Islamic Corporate Governance*

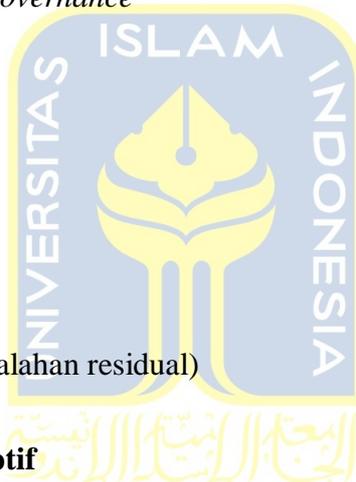
X2: Pengelolaan Zakat

a: Konstanta

b1: Koefisien regresi X1

b2: Koefisien regresi X2

e: *Error term model* (kesalahan residual)



3.5 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data, yang digunakan untuk menganalisis data kuantitatif dengan menggambarkan data yang akan dianalisis. Pada penelitian yang dilakukan statistik deskriptif yang digunakan pada variabel pengungkapan *islamic corporate governance*, pengelolaan zakat, dan kinerja keuangan bank umum syariah adalah pengungkapan nilai tertinggi (maksimum), nilai terendah (minimum), rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (std. dev). Dari data tersebut dapat diketahui distribusi data yang akan menjadi sampel penelitian.

3.6 Uji Asumsi Klasik

Untuk memenuhi persyaratan pengujian model regresi terhadap hipotesis maka harus memenuhi asumsi yang dikenal sebagai asumsi klasik, hal ini dilakukan untuk menghindari perolehan bias. Berikut beberapa pengujian asumsi klasik yang harus dilakukan.

3.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian yang digunakan untuk mengetahui data yang digunakan terdistribusi secara normal atau tidak normal. Apabila nilai probabilitas atau sig. lebih besar dari taraf signifikan $>0,05$ ($p>0,05$) maka model analisis regresi dapat dikatakan berdistribusi normal (Imam, 2013).

3.6.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke suatu pengamatan yang lain. Pada pengujian yang dilakukan jika $p\text{-value} < 0,05$ suatu data dapat dikatakan heteroskedastisitas dan pada pengujian yang dilakukan jika $p\text{-value} > 0,05$ maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas (Imam, 2013).

3.6.3 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya hubungan atau korelasi antara variabel bebas (independen). Dalam model regresi yang baik sebaiknya tidak terdapat korelasi antar variabel bebas. Dalam uji ini dilakukan dengan mencari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kriteria pengambilan keputusan dengan nilai *tolerance* dan VIF adalah apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 atau $VIF < 10$ dapat diartikan tidak terdapat multikolinieritas, sebaliknya apabila nilai VIF lebih besar dari

10 atau $VIF > 10$ dapat diartikan terdapat multikolinearitas. Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi karena $VIF = 1/tolerance$, *cut off* biasanya digunakan untuk memperlihatkan adanya masalah multikolinearitas jika *tolerance* $< 0,10$ (Imam, 2013).

3.6.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah pengujian yang digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi variabel yang ada dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Metode Uji *Durbin Watson* digunakan dalam penelitian ini untuk menguji autokorelasi.

3.7 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.

3.7.1 Koefisien Determinasi R^2

Analisis koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Apabila nilai R^2 rendah artinya kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen juga rendah, sebaliknya jika nilai R^2 besar maka kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen juga besar. Uji koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai R^2 ($0 \leq R^2 \leq 1$) (Imam, 2013).

3.8 Pengujian Hipotesis

3.8.1 Uji t

Uji statistik t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X). Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel

independen dengan variabel dependen secara parsial atau berpisah pada model regresi. Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan nilai probabilitas atau *p-value* signifikansi, jika *p-value* (*significant-t*) > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak, sebaliknya jika *p-value* (*significant-t*) < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima (Imam, 2013).

Berdasarkan hal di atas maka hipotesis sementara yang digunakan pada penelitian ini adalah:

H0: Variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y)

H1: Variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y)



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan populasi Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dari periode tahun 2018-2020 yang pada laporan tahunannya mengungkapkan laporan *good corporate governance* dan laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Penelitian yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, atau Teknik pengambilan sampel dari populasi dengan kriteria tertentu. Penjelasan jumlah sampel dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4.1 Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Bank umum syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2018-2020	14
2.	Bank umum syariah yang menerbitkan <i>annual report</i> selama tiga tahun berturut-turut yang mengungkapkan laporan <i>good corporate governance</i>	14
3.	Bank umum syariah yang menerbitkan <i>annual report</i> selama tiga tahun berturut turut yang mengungkapkan laporan keuangan.	14
	Jumlah perusahaan yang sesuai dengan kriteria	14

4.2 Statistik Deskriptif

Pada uji statistik deskriptif maka dapat dilihat deskripsi dan gambaran mengenai data sampel penelitian. Data yang dapat dijelaskan adalah nilai terendah (minimum),

nilai tertinggi (maksimum), rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (std. dev) dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Hasil statistik deskriptif penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ICG	42	0,9149	0,9574	0,946769	0,0170878
Pengelolaan Zakat	42	0,00	1,00	0,8095	0,39744
ROA	42	-0,0001	0,0210	0,008079	0,0060551

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai *minimum* ROA sebesar -0,0001 yang didapatkan oleh PT Bank Victoria Syariah pada tahun 2020 dapat diartikan bahwa nilai ROA yang paling rendah di antara perusahaan sampel adalah sebesar -0,0001 sedangkan untuk nilai *maximum* ROA sebesar 0,0210 yang didapatkan oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah pada tahun 2018 dapat diartikan bahwa nilai ROA yang paling tinggi di antara perusahaan sampel adalah sebesar 0,0210. Untuk nilai *mean* atau rata-rata ROA periode tahun 2018-2020 adalah sebesar 0,008079 yang artinya pada periode tahun 2018-2020 kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari jumlah aset adalah sebesar 0,80% dengan standar deviasi atau *Std. deviation* sebesar 0,0060551 yang artinya tingkat ukuran penyebaran data statistik variabel ROA adalah sebesar 0,0060.

2. Nilai *minimum* ICG sebesar 0,9149 yang didapatkan oleh PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah tahun 2018, PT Bank Panin Dubai Syariah tahun 2018, PT Bank Syariah Bukopin tahun 2018-2020, dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah tahun 2018-2020. Dapat diartikan bahwa *islamic corporate governance* pada bank umum Syariah tersebut adalah yang paling sedikit pelaksanaannya yaitu sebesar 0,9149 atau 91,49% sedangkan untuk nilai *maximum* ICG sebesar 0,9574 yang didapatkan oleh PT Bank Aceh Syariah tahun 2019 dan 2020, PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah tahun 2020, PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2018-2020, PT Bank Victoria Syariah tahun 2018-2020, PT Bank BRI Syariah tahun 2018-2020, PT Bank Jabar Banten Syariah tahun 2018-2020, PT Bank BNI Syariah tahun 2020, PT Bank Syariah Mandiri tahun 2018 dan 2019, PT Bank Mega Syariah Tahun 2018-2020, PT Bank Panin Dubai Syariah tahun 2019 dan 2020, PT BCA Syariah tahun 2018-2020, dan PT Maybank Syariah Indonesia tahun 2018-2020. Dapat diartikan bahwa *islamic corporate governance* pada bank umum syariah tersebut yang paling tinggi pelaksanaannya yaitu sebesar 0,9574 atau 95,74%. Untuk nilai *mean* atau rata-rata *islamic corporate governance* periode tahun 2018-2020 adalah sebesar 0,946769 yang artinya pada periode tahun 2018-2020 rata-rata pelaksanaan *islamic corporate governance* pada bank umum syariah adalah sebesar 94,67% dengan standar deviasi atau *Std. deviation* sebesar 0,0170878 yang artinya tingkat ukuran penyebaran data statistik variabel ICG adalah sebesar 0,0170878.
3. Nilai *minimum* pengelolaan zakat sebesar 0,00 yang didapatkan oleh PT BPD Nusa Tenggara barat tahun 2018, PT Bank Panin Dubai Syariah tahun 2018, PT Bank Syariah Bukopin tahun 2018-2020, dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah tahun 2018-2020. Dapat diartikan pada tahun tersebut Bank Umum Syariah tidak melaksanakan pengelolaan zakat atau melaporkan sumber dan penyaluran

dana zakat sedangkan untuk nilai *maximum* pengelolaan zakat sebesar 1,00 yang didapatkan oleh PT Bank Aceh Syariah tahun 2018-2020, PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah tahun 2019 dan 2020, PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2018-2020, PT Bank Victoria Syariah tahun 2018-2020, PT Bank BRI Syariah tahun 2018-2020, PT Bank Jabar Banten Syariah tahun 2018-2020, PT Bank BNI Syariah tahun 2018-2020, PT Bank Syariah Mandiri tahun 2018-2020, PT Bank Mega Syariah tahun 2018-2020, PT Bank Panin Dubai Syariah tahun 2019 dan 2020, PT BCA Syariah tahun 2018-2020, dan PT Maybank Syariah Indonesia tahun 2018-2020. Dapat diartikan pada tahun tersebut Bank Umum Syariah melaksanakan pengelolaan zakat atau melaporkan sumber dan penyaluran dana zakat. Untuk nilai *mean* atau rata-rata zakat periode tahun 2018-2020 adalah sebesar 0,8095 yang artinya pada periode tahun 2018-2020 rata rata pelaksanaan pengelolaan zakat pada bank umum syariah adalah sebesar 80,95% dengan standar deviasi atau *Std. deviation* sebesar 0,39744 yang artinya tingkat ukuran penyebaran data statistik variabel pengelolaan zakat adalah sebesar 0,39744.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji data yang digunakan terdistribusi dengan normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* yang dapat dikatakan normal apabila nilai *asympt . Sig (2-tailed)* di atas 0,05 (Imam, 2013) (Ghozali, 2013). Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

	Standardized Residual
--	-----------------------

N	42
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.200

Berdasarkan tabel di atas telah diperoleh data nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0.200 yang lebih besar dari 0.05 sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan data penelitian terdistribusikan dengan normal.

4.3.2 Uji Heteroskedastitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual antar satu pengamatan ke pengamatan lainnya pada penelitian ini. Pada penelitian ini pengujian heteroskedastisitas dilakukan melalui uji glejser. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel yang digunakan	Nilai Sig.
Kinerja keuangan (Y)	0.876
Pengelolaan Zakat (X1)	0.320
<i>Islamic Corporate Governance</i> (X2)	0.970

Berdasarkan hasil uji di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas karena tingkat signifikansi untuk setiap variabel lebih besar dari 0.05.

4.3.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji model regresi apakah ditemukan korelasi antar variabel bebas atau variabel independen di dalam penelitian. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) atau nilai *tolerance*, jika nilai VIF <10 dan nilai *tolerance* >0.1 maka data tidak mengandung multikolinearitas. Model regresi yang baik tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	Tolerance	Keterangan
<i>Islamic Corporate Governance</i> (X1)	6.187	0.162	Tidak terjadi multikolinearitas
Pengelolaan Zakat (X2)	6.187	0.162	Tidak terjadi multikolinearitas

Dari hasil analisis uji multikolinearitas, dapat dilihat nilai VIF dan *tolerance* pada variabel X1 *Islamic Corporate Governance* dan variabel X2 Pengelolaan Zakat memiliki nilai *tolerance* 0.162 dan nilai VIF 6.187 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel bebas dalam penelitian ini karena nilai *tolerance* >0.1 dan nilai VIF <10.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan pada

periode t-1 atau periode sebelumnya. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan metode *Durbin Watson*. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi

Durbin Watson
1.619

Berdasarkan hasil di atas diketahui nilai *Durbin Watson* sebesar 1.619 dan nilai signifikansi sebesar 5% yang dijadikan pembanding, penelitian menggunakan 42 sampel (n), dan memiliki variabel independen 2 ($k=2$), maka pada tabel *Durbin Watson* di peroleh nilai batas atas (dU) sebesar 1,601. Karena nilai yang diperoleh dari pengujian *Durbin Watson* sebesar 1,619 artinya lebih besar dari batas atas (dU) sebesar 1,601 dan kurang dari 4-1,601 (2,399). Dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi pada penelitian ini.

4.4 Analisis Linear Berganda

Analisis linear berganda adalah analisis untuk menguji arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, apakah berhubungan positif atau negatif. Dalam penelitian ini analisis linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh *islamic corporate governance* dan pengelolaan zakat terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

4.4.1 Koefisien Determinasi R^2

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Jika nilai R^2 kecil kemampuan

variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat menjadi terbatas. Besarnya nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R.Square* yang terletak antara 0-1. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

R	R Square	Adjusted R Square
0.513	0.263	0.225

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.225. sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel ICG dan pengelolaan zakat dapat menjelaskan variabel kinerja keuangan pada bank umum syariah sebesar 22,5% sesuai dengan sampel dan variabel bebas. Sedangkan sisanya ($100\% - 22,5\% = 77,5\%$) dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

4.4.2 Persamaan Regresi

Tabel 4.8 Hasil Uji Persamaan Regresi

Variabel	Koefisien regresi	Standard Error	t- hitung	Sig.	Hasil hipotesis
Constant	0.367	-	3.310	0.002	
X1	-0.389	-1.097	-3.209	0.003	Hipotesis tidak didukung
X2	0.011	0.742	2.171	0.036	Hipotesis didukung

Keterangan:

Variabel X1 : *Islamic Corporate Governance*

Variabel X2 : Pengelolaan Zakat

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0.367 - 0.289 + 0.011 + e$$

Dari persamaan di atas dapat diartikan bahwa :

1. Konstanta sebesar 0.367 menunjukkan bahwa variabel independen atau variabel bebas yang terdiri dari *islamic corporate governance* dan pengelolaan zakat bernilai konstan atau sama dengan nol. Maka nilai variabel kinerja keuangan (ROA) sebesar 0.367 satuan.
2. Nilai koefisiensi regresi variabel *islamic corporate governance* sebesar -0.389 yang menunjukkan bahwa setiap naiknya variabel *islamic corporate governance* sebesar 1 satuan, maka kinerja keuangan bank umum syariah akan menurun sebesar -0.389 satuan dengan asumsi semua variabel bebas atau variabel independen konstan.
3. Nilai koefisien regresi variabel pengelolaan zakat sebesar 0.011 yang menunjukkan bahwa setiap naiknya variabel pengelolaan zakat sebesar 1 satuan, maka kinerja keuangan bank umum syariah akan meningkat sebesar 0.011 satuan dengan asumsi semua variabel bebas atau variabel independen konstan.

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Uji t

Uji t dilakukan untuk mengukur kemampuan dari setiap variabel bebas atau variabel independen secara parsial dalam menerangkan variabel terikat atau variabel dependen. Pada penelitian ini alfa atau taraf signifikansi yang dilakukan dalam pengujian sebesar 0.05. Hasil dari uji t dapat dilihat pada tabel regresi linear berganda dan untuk pembahasan dari hasil uji t adalah sebagai berikut:

1. H1: Islamic Corporate Governance berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah

Hasil pengujian hipotesis pertama dapat dilihat pada tabel regresi linear berganda yang di mana variabel *islamic corporate governance* memiliki signifikansi 0.003 yang berarti kurang dari angka 0.05 dan t hitung menunjukkan angka -3.209 yang di mana lebih kecil dari t tabel dengan angka 1.684 pada tingkat signifikan 0.05, sedangkan nilai koefisien beta sebesar -0.389. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *islamic corporate governance* secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan sehingga hipotesis pertama penelitian ini tidak didukung.

2. H2: Pengelolaan zakat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah

Hasil pengujian hipotesis kedua dapat dilihat pada tabel regresi linear berganda yang di mana variabel pengelolaan zakat memiliki signifikansi 0.036 yang berarti kurang dari angka 0.05 dan t hitung menunjukkan angka 2.171 yang di mana lebih besar dari t tabel dengan angka 1.684 pada tingkat signifikan 0.05, sedangkan nilai koefisiensi beta sebesar 0.011. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan sehingga hipotesis kedua penelitian ini didukung.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Bank Umum Syariah.

Islamic corporate governance yang merupakan salah satu variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, dalam pengukurannya didapatkan angka koefisien regresi sebesar -0.389 dan nilai signifikan sebesar 0.003. *Islamic corporate governance*

dalam penelitian ini berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan karena nilai signifikansi lebih kecil dari alfa 5%.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa ICG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Pada dasarnya penerapan ICG yang baik dapat menjamin BUS dalam pelaksanaan kegiatannya sudah mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah secara benar dalam mencapai tujuan perusahaan dan dapat mendukung dan meningkatkan kinerja perusahaan, oleh karena itu kemungkinan besar pengaruh ICG dinilai secara parsial terhadap kinerja keuangan. Artinya, penerapan ICG tidak memberikan pengaruh besar dalam kontribusi kinerja keuangan atau peningkatan penerapan ICG tidak diikuti perubahan rasio keuangan BUS yang akhirnya para *shareholder* atau *stakeholder* menilai penerapan ICG yang baik dalam perusahaan bukan pengaruh besar dalam perusahaan, hal ini yang kemudian memengaruhi turunnya kinerja keuangan BUS. Penyebab yang lain menurut Firmansyah (2018) bank syariah masih fokus terhadap pengukuran keuangan dibandingkan pengukuran non-keuangan atau masih berorientasikan peningkatan rasio keuangan dan tujuan jangka pendek. Penyebab lainnya lagi adalah kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan dengan berlandung dibalik *title* syariah, seperti contohnya kasus petinggi Bank Jabar Banten Syariah yang melakukan kecurangan dalam kasus pemberian kredit pembiayaan yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh salah satu komponen ICG yaitu komite pembiayaan (News, 2022). Kecurangan-kecurangan yang dilakukan menyebabkan kerugian perusahaan dan kerugian negara yang dapat menyebabkan turunnya kinerja keuangan perusahaan dan nilai perusahaan yang mengakibatkan *stakeholder* atau *shareholder* tidak dipercaya lagi. Hal ini mendukung penelitian Kholilah & Wirman (2021) yang menyatakan bahwa *islamic corporate governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.

4.6.2 Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Bank Umum Syariah

Pengelolaan zakat yang merupakan salah satu variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, dalam pengukurannya didapatkan angka koefisien regresi sebesar 0.011 dan nilai signifikan sebesar 0,036. Pengelolaan zakat dalam penelitian ini berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan karena nilai signifikansi lebih besar dari alfa 5%.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Rhamadhani (2016) yang mengatakan bahwa zakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah yang dihitung dengan ROA. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosman dkk (2019) yang mengatakan bahwa kontribusi zakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah yang salah satunya dihitung dengan ROA.

Dapat disimpulkan dari hasil penelitian dan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya bahwa melaksanakan pengelolaan zakat dengan baik akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan dengan berzakat tidak akan mengurangi harta bagi yang melaksanakannya karena disebutkan dalam hadits Rasulullah bersabda, “jangan engkau menyimpan harta (tanpa menyedekahkannya). (karena jika engkau melakukannya), maka Allah akan menahan nikmat-Nya darimu.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan Pengelolaan Zakat terhadap Kinerja Keuangan pada studi empiris Bank Umum Syariah periode 2018-2020. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan berupa analisis penerapan ICG dan pengelolaan zakat pada BUS dan hipotesis yang diajukan, maka kesimpulan dari penelitian sebagai berikut :

1. *Islamic Corporate Governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya ICG tidak memberi kontribusi yang besar terhadap kinerja keuangan atau ICG dinilai secara parsial oleh perusahaan atau terdapat kecurangan yang dilakukan dengan berlandung dibalik *title* “syariah”.
2. Pengelolaan Zakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Hal ini berarti pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh perusahaan terbukti tidak mengurangi harta perusahaan. Semakin baik pengelolaan zakat yang maka kinerja keuangan bank juga semakin meningkat.

5.2 Keterbatasan pada Penelitian

Setelah dilakukan penelitian, penulis menemukan beberapa keterbatasan penelitian yang dapat menjadi kelemahan yang berpengaruh terhadap hasil penelitian, yaitu :

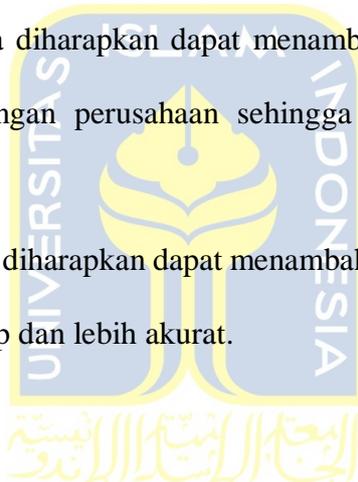
1. Penelitian hanya menggunakan Return on Asset (ROA) sebagai proxy dalam menilai kinerja keuangan.
2. Penelitian hanya menggunakan laporan tahunan perusahaan pada periode 2018-2020.

3. Penelitian terkait variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih sedikit sehingga sumber informasi masih terbatas.

5.3 Saran dari Penulis

Berdasarkan analisis penelitian serta kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, terdapat beberapa saran dari penulis, antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah indikator yang digunakan dalam mengukur ICG perusahaan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah indikator yang digunakan dalam mengukur pengelolaan zakat perusahaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah proxy yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan sehingga hasil pengukuran kinerja lebih lengkap.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah periode penelitian sehingga data yang diolah lebih lengkap dan lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ajili, H., & Bouri, A. (2018). Corporate Governance Quality of Islamic Banks: Measurement and Effect on Financial Performance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 470–487. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2017-0131>
- Al-Quran. (n.d.). *Surat Al-Baqarah (2) ayat 110*. Qur'an Kemenag. Retrieved June 7, 2022, from <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>
- Aslam, E., & Haron, R. (2020). Does Corporate Governance Affect the Performance of Islamic Banks? New Insight into Islamic Countries. *Corporate Governance*, 1–18. <https://doi.org/10.1108/CG-11-2019-0350>
- Bambang, R., Arif, B., & Adi, P. (2008). *Corporate Social Responsibility: Jawaban bagi model pembangunan Indonesia masa kini*. ICSD.
- Bank Indonesia. (2021). *Indonesia Raih Peringkat Pertama Islamic Finance Country Index (IFCI) Pada Global Islamic Finance Report 2021*. Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2328321.aspx
- Bhatti, M., & Bhatti, M. I. (2010). Toward Understanding Islamic Corporate Governance Issues in Islamic Finance. *Asian Politics and Policy*, 2(1), 25–38. <https://doi.org/10.1111/j.1943-0787.2009.01165.x>
- Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI. (2015). PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. In *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*.
- Firmansyah, I. (2018). Pengaruh Tata Kelola Yang Baik Terhadap Maqoshid Indeks Pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 1–10. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak/article/view/840>
- Governance, K. N. K. (2011). *Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah*.
- Hisamuddin, N., & Tirta K, M. Y. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 10(2), 109. <https://doi.org/10.19184/jauj.v10i2.1254>
- Imam, G. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (7th ed.). Universitas Diponegoro.
- Indonesia, B. (2007). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Indonesia, B. (2009). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009*. In *Bank Indonesia*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Keuangan Syariah Indonesia Tumbuh Positif di Tengah Pandemi. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 1. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/keuangan-syariah-indonesia-tumbuh-positif-di-tengah-pandemi/>
- Khan, I., & Zahid, S. N. (2019). The impact of Shari'ah and corporate governance on Islamic banks performance: evidence from Asia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 483–501. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2019-0003>

- Kholilah, & Wirman. (2021). Pengaruh Intellectual Capital dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 101–114. <https://doi.org/10.30868/ad.v5i01.1219>
- Mardiani, L., Yadiati, W., & Jaenudin, E. (2019). Islamic Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah (UUS) Periode 2013-2017. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 6(2), 1–15. <https://doi.org/10.30656/jak.v6i2.1411>
- Nasional, B. P. H. (1998). Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. In *Badan Pembinaan Hukum Nasional*. <http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>
- News, B. (2022). *Lagi, Petinggi BJB Terlibat Perampokan Duit Negara Berkedok Kredit*. Banten News. Lagi, Petinggi BJB Terlibat Perampokan Duit Negara Berkedok Kredit
- Nova, R. (2018). Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG) pada Perbankan Syariah di Indonesia. *THE INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED BUSINESS*, 2(April).
- Nunung, G., & Sri, H. (2014). Islamic Corporate Governance. In *EF Press Digimedia* (Issue 1).
- Nurhayati, P., & Saputri, R. D. (2021). Implikasi Zakat dan Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1416–1424.
- OJK. (2018). Statistik Perbankan Syariah. In *Otoritas Jasa Keuangan*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2018.aspx>
- OJK. (2019). Statistik Perbankan Syariah - Desember. In *Otoritas Jasa Keuangan*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>
- OJK. (2020). Statistik Perbankan Syariah (SPS). In *Otoritas Jasa Keuangan*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>
- OJK. (2021). Snapshot Perbankan Syariah September 2021. In *Otoritas Jasa Keuangan*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/default.aspx>
- Padli, M. S., Diana, N., & Afifudin. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance, Maqashid Sharia, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *E-Jra*, 08(01), 1–13.
- Quran, A. (n.d.-a). *Surat At-Taubah ayat 60*. Qur'an Kemenag. Retrieved June 7, 2022, from <https://quran.kemenag.go.id/sura/9>
- Quran, A. (n.d.-b). *Surat Saad (38) ayat 24*. Qur'an Kemenag. Retrieved June 7, 2022, from <https://quran.kemenag.go.id/sura/38>
- R Edward, F., & John, M. (2001). *A Stakeholder Approach to Strategic Management*. <https://doi.org/10.1002/jctb.619>
- Rakyat, D. P. (2000). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Rakyat, D. P. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang*

Perbankan Syariah.

- Rhamadhani, R. F. (2016). Pengaruh Zakat terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia). *HUNAF: Jurnal Studia Islamika*, 13(2), 344–361. <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.443.344-361>
- Rosman, R., Haron, R., & Othman Nurul Balqis Mohamed. (2019). The Impact of Zakat Contribution on The Financial Performance of Islamic Banks in Malaysia. *Al-Shajarah*, 1–29. <https://www.researchgate.net/publication/336486471>
- Sri, H., & Susminingsih. (2017). The Effect of Zakat on Financial Performance of Sharia Banking in Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1–7. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i1.82-92>
- Syurmita, & Fircarina, M. J. (2020). Pengaruh Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility dan Penerapan Good Governance Bisnis Syariah terhadap Reputasi dan Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 1(2), 87–97.
- Wahidah, N., & Iman, L. (2019). Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Metode Economic Value Added. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 1–42.
- Wardiwyono, S., & Jayanti, A. F. (2021). Peran Islamic Corporate Social Responsibility dalam Memoderasi Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/10.35836/jakis.v9i1.241>
- Zara, A. C., & Erinos. (2020). Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perbankan Syariah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2065–2082.



**DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 DAFTAR PERUSAHAAN**

Bank Umum Syariah
1. PT. Bank Aceh Syariah
2. PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3. PT. Bank Muamalat Indonesia
4. PT. Bank Victoria Syariah
5. PT. Bank BRI Syariah
6. PT. Bank Jabar Banten Syariah
7. PT. Bank BNI Syariah
8. PT. Bank Syariah Mandiri
9. PT. Bank Mega Syariah
10. PT. Bank Panin Dubai Syariah
11. PT. Bank Syariah Bukopin
12. PT. BCA Syariah
13. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14. PT. Maybank Syariah Indonesia

LAMPIRAN 2 TABEL HASIL PENGUJIAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
ICG	42	.9149	.9574	.946769	.0170878
ZAKAT	42	.00	1.00	.8095	.39744
ROA	42	-.0001	.0210	.008079	.0060551
Valid N (listwise)	42				

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardiz ed Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.00519737
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.077
	Positive	.077
	Negative	-.070
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	.376	.117		3.223	.003		
	ICG	-.403	.128	-1.124	-3.162	.003	.162	6.187
	ZAKAT	.016	.005	1.017	2.861	.007	.162	6.187

a. Dependent Variable: ROA

Hasil Uji Heterokedastistas

Model		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.009	.055		.156	.876		
	ICG	-.002	.060	-.014	-.038	.970	.162	6.187
	ZAKAT	-.003	.003	-.371	-1.007	.320	.162	6.187

a. Dependent Variable: Abs_RES


 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.513 ^a	.263	.225	.0053290	1.619

a. Predictors: (Constant), ZAKAT, ICG

b. Dependent Variable: ROA


 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.513 ^a	.263	.225	.0053290

a. Predictors: (Constant), ZAKAT, ICG

Hasil Uji t

Model		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	.367	.111		3.310	.002		
	ICG	-.389	.121	-1.097	-3.209	.003	.162	6.187
	ZAKAT	.011	.005	.742	2.171	.036	.162	6.187

a. Dependent Variable: ROA



LAMPIRAN 3 TABEL HASIL PERHITUNGAN ICG, ZAKAT, DAN ROA

No.	Nama Bank	ICG	Zakat	ROA
1.	PT. Bank Aceh Syariah	0.9361	1	0.0195
2.	PT. Bank Aceh Syariah	0.9574	1	0.0180
3.	PT. Bank Aceh Syariah	0.9574	1	0.111
4.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	0.9149	0	0.0055
5.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	0.9361	1	0.0189
6.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	0.9574	1	0.0125
7.	PT. Bank Muamalat Indonesia	0.9574	1	0.0008
8.	PT. Bank Muamalat Indonesia	0.9574	1	0.0033
9.	PT. Bank Muamalat Indonesia	0.9574	1	0.0002
10.	PT. Bank Victoria Syariah	0.9574	1	0.0023
11.	PT. Bank Victoria Syariah	0.9574	1	0.0004
12.	PT. Bank Victoria Syariah	0.9574	1	-0.0001
13.	PT. Bank BRI Syariah	0.9574	1	0.0087
14.	PT. Bank BRI Syariah	0.9574	1	0.0017
15.	PT. Bank BRI Syariah	0.9574	1	0.0043
16.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	0.9574	1	0.0035
17.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	0.9574	1	0.0020
18.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	0.9574	1	0.0045
19.	PT. Bank BNI Syariah	0.9361	1	0.0101
20.	PT. Bank BNI Syariah	0.9361	1	0.0121
21.	PT. Bank BNI Syariah	0.9574	1	0.0092
22.	PT. Bank Syariah Mandiri	0.9574	1	0.0062

23.	PT. Bank Syariah Mandiri	0.9574	1	0.0114
24.	PT. Bank Syariah Mandiri	0.9361	1	0.0113
25.	PT. Bank Mega Syariah	0.9574	1	0.0063
26.	PT. Bank Mega Syariah	0.9574	1	0.0061
27.	PT. Bank Mega Syariah	0.9574	1	0.0082
28.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	0.9149	0	0.0024
29.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	0.9574	1	0.0012
30.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	0.9574	1	0.0000
31.	PT. Bank Syariah Bukopin	0.9149	0	0.0154
32.	PT. Bank Syariah Bukopin	0.9149	0	0.0003
33.	PT. Bank Syariah Bukopin	0.9149	0	0.0184
34.	PT. BCA Syariah	0.9574	1	0.0083
35.	PT. BCA Syariah	0.9574	1	0.0078
36.	PT. BCA Syariah	0.9574	1	0.0075
37.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	0.9149	0	0.0210
38.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	0.9149	0	0.0165
39.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	0.9149	0	0.0110
40.	PT. Maybank Syariah Indonesia	0.9574	1	0.0127
41.	PT. Maybank Syariah Indonesia	0.9574	1	0.0114
42.	PT. Maybank Syariah Indonesia	0.9574	1	0.0074

LAMPIRAN 4 TABEL PENILAIAN PENERAPAN ICG

1. PT Bank Aceh Syariah

No.	Indikator	2018	2019	2020
1.	Pernyataan bahwasannya bank sudah menerapkan ICG pada laporan tahunan yang telah di publikasi	1	1	1
2.	Pengungkapan aspek yang belum terlaksana beserta alasannya	0	1	1
3.	Terdapat nama dewan komisaris dan statusnya (komisaris independen atau komisaris bukan independen)	1	1	1
4.	Penjelasan tugas dan fungsi dewan komisaris	1	1	1
5.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan komisaris serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
6.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri <i>atau self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan komisaris	1	1	1
7.	Pengungkapan nama anggota komite	1	1	1
8.	Penjelasan mekanisme dan fungsi komite	1	1	1
9.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan komite serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
10.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas komite	1	1	1
11.	Melampirkan laporan tugas komite	1	1	1
12.	Terdapat nama anggota Dewan Pengawas Syariah	1	1	1

13.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan pengawas syariah serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
14.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri atau <i>self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan pengawas syariah	1	1	1
15.	Pengungkapan nama dan jabatan direksi serta fungsi	1	1	1
16.	Penjelasan mekanisme kerja direksi (pengambilan keputusan & pendelegasian wewenang)	1	1	1
17.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan direksi serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
18.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas direksi	1	1	1
19.	Penjelasan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal (audit internal dan pengendalian risiko serta sistem pengawasan)	1	1	1
20.	Pengungkapan visi, misi dan nilai perusahaan	1	1	1
21.	Pengungkapan pemilik mayoritas	1	1	1
22.	Pengungkapan investor berbasis <i>profit and loss sharing</i> (pembagian laba dan rugi)	0	0	0
23.	Kebijakan dan remunerasi direksi, dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris	1	1	1
24.	Menyebutkan transaksi dengan pihak yang mempunyai benturan kepentingan	1	1	1

25.	Hasil penilaian implementasi icg dilaporkan pada rapat umum tahunan pemilik	1	1	1
26.	Mengungkapkan kejadian luar biasa yang terjadi di perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan	1	1	1
27.	Melaksanakan zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	1	1	1
28.	Melaksanakan kewajiban sebagai penerima dan penyalur dana zakat, infak, sadaqah, dan wakaf	1	1	1
29.	Terdapat kebijakan yang memastikan fungsi setiap organ perusahaan terlaksana secara efektif	1	1	1
30.	Terdapat kebijakan yang memastikan akuntabilitas, pengendalian internal secara efektif, dan pelaporan keuangan yang benar terlaksana dengan baik	1	1	1
31.	Mengungkapkan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan operasional yang terkait penerapan skema bagi hasil dan skema syariah lainnya	1	1	1
32.	Pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan yang berdasar pada nilai perusahaan dan etika bisnis	1	1	1
33.	Fasilitas bagi pemegang saham dan stakeholder berupa informasi yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian	1	1	1
34.	Kebijakan untuk menyempurnakan peraturan perusahaan untuk memenuhi prinsip ICG	1	1	1

35.	Kebijakan untuk menilai pelaksanaan ICG bagi pelaksana bisnis syariah	1	1	1
36.	Menyelaraskan pemahaman dan kepedulian seluruh anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan dewan direksi, pemegang saham, dan seluruh karyawan terhadap ICG dan berkomitmen untuk melaksanakannya	1	1	1
37.	Melakukan kajian pelaksanaan ICG yang berkaitan dengan kondisi perusahaan dan melakukan tindakan korektif bila diperlukan	1	1	1
38.	Penyusunan pedoman dan program pelaksanaan ICG	1	1	1
39.	Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan ICG bagi seluruh pihak di dalam perusahaan serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman ICG dalam kegiatan perusahaan sehingga tercipta rasa memiliki	1	1	1
40.	Melaksanakan penilaian sendiri atau jasa pihak luar (independen) untuk memastikan penerapan ICG berjalan terus menerus, hasil penilaian diungkapkan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan	1	1	1
41.	Memberikan informasi bagi stakeholder untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan ICG	1	1	1
42.	Mempraktikkan etika bisnis syariah dengan konsisten sehingga dapat mewujudkan bisnis yang sehat, transparan, efisien, dan islami	1	1	1

43.	Mematuhi setiap ketentuan dan ketentuan syariah dalam bisnis, dengan halal dan baik (thayyib) dari segi sebenarnya (dzat) ataupun caranya	1	1	1
44.	Melaksanakan kegiatan dalam perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	1	1	1
45.	Menggunakan aturan perundang undangan dalam membentuk aturan spesifik dalam organisasi atau manajemen dalam perusahaan	1	1	1
46.	Menggunakan asas ICG untuk meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja secara terus menerus	1	1	1
47.	Menerapkan fungsi ombudsman yang berfungsi untuk menampung informasi tentang kemungkinan adanya penyimpangan dalam perusahaan	0	0	0

2. PT BPD NTB Syariah

No.	Indikator	2018	2019	2020
1.	Pernyataan bahwasannya bank sudah menerapkan ICG pada laporan tahunan yang telah di publikasi	1	1	1
2.	Pengungkapan aspek yang belum terlaksana beserta alasannya	1	1	1
3.	Terdapat nama dewan komisaris dan statusnya (komisaris independen atau komisaris bukan independen)	1	1	1

4.	Penjelasan tugas dan fungsi dewan komisaris	1	1	1
5.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan komisaris serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
6.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri <i>atau self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan komisaris	1	1	1
7.	Pengungkapan nama anggota komite	1	1	1
8.	Penjelasan mekanisme dan fungsi komite	1	1	1
9.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan komite serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
10.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas komite	1	1	1
11.	Melampirkan laporan tugas komite	1	1	1
12.	Terdapat nama anggota Dewan Pengawas Syariah	1	1	1
13.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan pengawas syariah serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
14.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri <i>atau self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan pengawas syariah	1	1	1
15.	Pengungkapan nama dan jabatan direksi serta fungsi	1	1	1
16.	Penjelasan mekanisme kerja direksi (pengambilan keputusan & pendelegasian wewenang)	1	1	1

17.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan direksi serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
18.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas direksi	1	1	1
19.	Penjelasan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal (audit internal dan pengendalian risiko serta sistem pengawasan)	1	1	1
20.	Pengungkapan visi, misi dan nilai perusahaan	1	1	1
21.	Pengungkapan pemilik mayoritas	1	1	1
22.	Pengungkapan investor berbasis <i>profit and loss sharing</i> (pembagian laba dan rugi)	0	0	0
23.	Kebijakan dan remunerasi direksi, dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris	1	1	1
24.	Menyebutkan transaksi dengan pihak yang mempunyai benturan kepentingan	1	1	1
25.	Hasil penilaian implementasi icg dilaporkan pada rapat umum tahunan pemilik	1	1	1
26.	Mengungkapkan kejadian luar biasa yang terjadi di perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan	1	1	1
27.	Melaksanakan zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	0	1	1
28.	Melaksanakan kewajiban sebagai penerima dan penyalur dana zakat, infak, sadaqah, dan wakaf	0	1	1

29.	Terdapat kebijakan yang memastikan fungsi setiap organ perusahaan terlaksana secara efektif	1	1	1
30.	Terdapat kebijakan yang memastikan akuntabilitas, pengendalian internal secara efektif, dan pelaporan keuangan yang benar terlaksana dengan baik	1	1	1
31.	Mengungkapkan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan operasional yang terkait penerapan skema bagi hasil dan skema syariah lainnya	1	1	1
32.	Pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan yang berdasar pada nilai perusahaan dan etika bisnis	1	1	1
33.	Fasilitas bagi pemegang saham dan stakeholder berupa informasi yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian	1	1	1
34.	Kebijakan untuk menyempurnakan peraturan perusahaan untuk memenuhi prinsip ICG	1	1	1
35.	Kebijakan untuk menilai pelaksanaan ICG bagi pelaksana bisnis syariah	1	1	1
36.	Menyelaraskan pemahaman dan kepedulian seluruh anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan dewan direksi, pemegang saham, dan seluruh karyawan terhadap ICG dan berkomitmen untuk melaksanakannya	1	1	1
37.	Melakukan kajian pelaksanaan ICG yang berkaitan dengan kondisi perusahaan dan melakukan tindakan korektif bila diperlukan	1	1	1

38.	Penyusunan pedoman dan program pelaksanaan ICG	1	1	1
39.	Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan ICG bagi seluruh pihak di dalam perusahaan serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman ICG dalam kegiatan perusahaan sehingga tercipta rasa memiliki	1	1	1
40.	Melaksanakan penilaian sendiri atau jasa pihak luar (independen) untuk memastikan penerapan ICG berjalan terus menerus, hasil penilaian diungkapkan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan	1	1	1
41.	Memberikan informasi bagi stakeholder untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan ICG	1	1	1
42.	Mempraktikkan etika bisnis syariah dengan konsisten sehingga dapat mewujudkan bisnis yang sehat, transparan, efisien, dan islami	1	1	1
43.	Mematuhi setiap ketentuan dan ketentuan syariah dalam bisnis, dengan halal dan baik (thayyib) dari segi sebenarnya (dzat) ataupun caranya	1	1	1
44.	Melaksanakan kegiatan dalam perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	1	1	1
45.	Menggunakan aturan perundang undangan dalam membentuk aturan spesifik dalam organisasi atau manajemen dalam perusahaan	1	1	1

46.	Menggunakan asas ICG untuk meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja secara terus menerus	1	1	1
47.	Menerapkan fungsi ombudsman yang berfungsi untuk menampung informasi tentang kemungkinan adanya penyimpangan dalam perusahaan	0	0	0

3. PT Bank Muamalat Indonesia

No.	Indikator	2018	2019	2020
1.	Pernyataan bahwasannya bank sudah menerapkan ICG pada laporan tahunan yang telah di publikasi	1	1	1
2.	Pengungkapan aspek yang belum terlaksana beserta alasannya	1	1	1
3.	Terdapat nama dewan komisaris dan statusnya (komisaris independen atau komisaris bukan independen)	1	1	1
4.	Penjelasan tugas dan fungsi dewan komisaris	1	1	1
5.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan komisaris serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
6.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri <i>atau self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan komisaris	1	1	1
7.	Pengungkapan nama anggota komite	1	1	1
8.	Penjelasan mekanisme dan fungsi komite	1	1	1

9.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan komite serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
10.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas komite	1	1	1
11.	Melampirkan laporan tugas komite	1	1	1
12.	Terdapat nama anggota Dewan Pengawas Syariah	1	1	1
13.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan pengawas syariah serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
14.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri atau <i>self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan pengawas syariah	1	1	1
15.	Pengungkapan nama dan jabatan direksi serta fungsi	1	1	1
16.	Penjelasan mekanisme kerja direksi (pengambilan keputusan & pendelegasian wewenang)	1	1	1
17.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan direksi serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
18.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas direksi	1	1	1
19.	Penjelasan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal (audit internal dan pengendalian risiko serta sistem pengawasan)	1	1	1
20.	Pengungkapan visi, misi dan nilai perusahaan	1	1	1
21.	Pengungkapan pemilik mayoritas	1	1	1

22.	Pengungkapan investor berbasis <i>profit and loss sharing</i> (pembagian laba dan rugi)	0	0	0
23.	Kebijakan dan remunerasi direksi, dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris	1	1	1
24.	Menyebutkan transaksi dengan pihak yang mempunyai benturan kepentingan	1	1	1
25.	Hasil penilaian implementasi icg dilaporkan pada rapat umum tahunan pemilik	1	1	1
26.	Mengungkapkan kejadian luar biasa yang terjadi di perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan	1	1	1
27.	Melaksanakan zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	1	1	1
28.	Melaksanakan kewajiban sebagai penerima dan penyalur dana zakat, infak, sadaqah, dan wakaf	1	1	1
29.	Terdapat kebijakan yang memastikan fungsi setiap organ perusahaan terlaksana secara efektif	1	1	1
30.	Terdapat kebijakan yang memastikan akuntabilitas, pengendalian internal secara efektif, dan pelaporan keuangan yang benar terlaksana dengan baik	1	1	1
31.	Mengungkapkan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan operasional yang terkait penerapan skema bagi hasil dan skema syariah lainnya	1	1	1
32.	Pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan yang berdasar pada nilai perusahaan dan etika bisnis	1	1	1

33.	Fasilitas bagi pemegang saham dan stakeholder berupa informasi yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian	1	1	1
34.	Kebijakan untuk menyempurnakan peraturan perusahaan untuk memenuhi prinsip ICG	1	1	1
35.	Kebijakan untuk menilai pelaksanaan ICG bagi pelaksana bisnis syariah	1	1	1
36.	Menyelaraskan pemahaman dan kepedulian seluruh anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan dewan direksi, pemegang saham, dan seluruh karyawan terhadap ICG dan berkomitmen untuk melaksanakannya	1	1	1
37.	Melakukan kajian pelaksanaan ICG yang berkaitan dengan kondisi perusahaan dan melakukan tindakan korektif bila diperlukan	1	1	1
38.	Penyusunan pedoman dan program pelaksanaan ICG	1	1	1
39.	Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan ICG bagi seluruh pihak di dalam perusahaan serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman ICG dalam kegiatan perusahaan sehingga tercipta rasa memiliki	1	1	1
40.	Melaksanakan penilaian sendiri atau jasa pihak luar (independen) untuk memastikan penerapan ICG berjalan terus menerus, hasil penilaian diungkapkan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan	1	1	1

41.	Memberikan informasi bagi stakeholder untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan ICG	1	1	1
42.	Mempraktikkan etika bisnis syariah dengan konsisten sehingga dapat mewujudkan bisnis yang sehat, transparan, efisien, dan islami	1	1	1
43.	Mematuhi setiap ketentuan dan ketentuan syariah dalam bisnis, dengan halal dan baik (thayyib) dari segi sebenarnya (dzat) ataupun caranya	1	1	1
44.	Melaksanakan kegiatan dalam perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	1	1	1
45.	Menggunakan aturan perundang undangan dalam membentuk aturan spesifik dalam organisasi atau manajemen dalam perusahaan	1	1	1
46.	Menggunakan asas ICG untuk meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja secara terus menerus	1	1	1
47.	Menerapkan fungsi ombudsman yang berfungsi untuk menampung informasi tentang kemungkinan adanya penyimpangan dalam perusahaan	0	0	0

4. PT BankVictoria Syariah

No.	Indikator	2018	2019	2020
1.	Pernyataan bahwasannya bank sudah menerapkan ICG pada laporan tahunan yang telah di publikasi	1	1	1
2.	Pengungkapan aspek yang belum terlaksana beserta alasannya	1	1	1
3.	Terdapat nama dewan komisaris dan statusnya (komisaris independen atau komisaris bukan independen)	1	1	1
4.	Penjelasan tugas dan fungsi dewan komisaris	1	1	1
5.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan komisaris serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
6.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri <i>atau self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan komisaris	1	1	1
7.	Pengungkapan nama anggota komite	1	1	1
8.	Penjelasan mekanisme dan fungsi komite	1	1	1
9.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan komite serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
10.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas komite	1	1	1
11.	Melampirkan laporan tugas komite	1	1	1
12.	Terdapat nama anggota Dewan Pengawas Syariah	1	1	1

13.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan pengawas syariah serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
14.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri atau <i>self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan pengawas syariah	1	1	1
15.	Pengungkapan nama dan jabatan direksi serta fungsi	1	1	1
16.	Penjelasan mekanisme kerja direksi (pengambilan keputusan & pendelegasian wewenang)	1	1	1
17.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan direksi serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
18.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas direksi	1	1	1
19.	Penjelasan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal (audit internal dan pengendalian risiko serta sistem pengawasan)	1	1	1
20.	Pengungkapan visi, misi dan nilai perusahaan	1	1	1
21.	Pengungkapan pemilik mayoritas	1	1	1
22.	Pengungkapan investor berbasis <i>profit and loss sharing</i> (pembagian laba dan rugi)	0	0	0
23.	Kebijakan dan remunerasi direksi, dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris	1	1	1
24.	Menyebutkan transaksi dengan pihak yang mempunyai benturan kepentingan	1	1	1

25.	Hasil penilaian implementasi icg dilaporkan pada rapat umum tahunan pemilik	1	1	1
26.	Mengungkapkan kejadian luar biasa yang terjadi di perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan	1	1	1
27.	Melaksanakan zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	1	1	1
28.	Melaksanakan kewajiban sebagai penerima dan penyalur dana zakat, infak, sadaqah, dan wakaf	1	1	1
29.	Terdapat kebijakan yang memastikan fungsi setiap organ perusahaan terlaksana secara efektif	1	1	1
30.	Terdapat kebijakan yang memastikan akuntabilitas, pengendalian internal secara efektif, dan pelaporan keuangan yang benar terlaksana dengan baik	1	1	1
31.	Mengungkapkan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan operasional yang terkait penerapan skema bagi hasil dan skema syariah lainnya	1	1	1
32.	Pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan yang berdasar pada nilai perusahaan dan etika bisnis	1	1	1
33.	Fasilitas bagi pemegang saham dan stakeholder berupa informasi yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian	1	1	1
34.	Kebijakan untuk menyempurnakan peraturan perusahaan untuk memenuhi prinsip ICG	1	1	1

35.	Kebijakan untuk menilai pelaksanaan ICG bagi pelaksana bisnis syariah	1	1	1
36.	Menyelaraskan pemahaman dan kepedulian seluruh anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan dewan direksi, pemegang saham, dan seluruh karyawan terhadap ICG dan berkomitmen untuk melaksanakannya	1	1	1
37.	Melakukan kajian pelaksanaan ICG yang berkaitan dengan kondisi perusahaan dan melakukan tindakan korektif bila diperlukan	1	1	1
38.	Penyusunan pedoman dan program pelaksanaan ICG	1	1	1
39.	Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan ICG bagi seluruh pihak di dalam perusahaan serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman ICG dalam kegiatan perusahaan sehingga tercipta rasa memiliki	1	1	1
40.	Melaksanakan penilaian sendiri atau jasa pihak luar (independen) untuk memastikan penerapan ICG berjalan terus menerus, hasil penilaian diungkapkan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan	1	1	1
41.	Memberikan informasi bagi stakeholder untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan ICG	1	1	1
42.	Mempraktikkan etika bisnis syariah dengan konsisten sehingga dapat mewujudkan bisnis yang sehat, transparan, efisien, dan islami	1	1	1

43.	Mematuhi setiap ketentuan dan ketentuan syariah dalam bisnis, dengan halal dan baik (thayyib) dari segi sebenarnya (dzat) ataupun caranya	1	1	1
44.	Melaksanakan kegiatan dalam perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	1	1	1
45.	Menggunakan aturan perundang undangan dalam membentuk aturan spesifik dalam organisasi atau manajemen dalam perusahaan	1	1	1
46.	Menggunakan asas ICG untuk meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja secara terus menerus	1	1	1
47.	Menerapkan fungsi ombudsman yang berfungsi untuk menampung informasi tentang kemungkinan adanya penyimpangan dalam perusahaan	0	0	0

5. PT Bank BRI Syariah

No.	Indikator	2018	2019	2020
1.	Pernyataan bahwasannya bank sudah menerapkan ICG pada laporan tahunan yang telah di publikasi	1	1	1
2.	Pengungkapan aspek yang belum terlaksana beserta alasannya	1	1	1

3.	Terdapat nama dewan komisaris dan statusnya (komisaris independen atau komisaris bukan independen)	1	1	1
4.	Penjelasan tugas dan fungsi dewan komisaris	1	1	1
5.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan komisaris serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
6.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri <i>atau self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan komisaris	1	1	1
7.	Pengungkapan nama anggota komite	1	1	1
8.	Penjelasan mekanisme dan fungsi komite	1	1	1
9.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan komite serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
10.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas komite	1	1	1
11.	Melampirkan laporan tugas komite	1	1	1
12.	Terdapat nama anggota Dewan Pengawas Syariah	1	1	1
13.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan pengawas syariah serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
14.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri <i>atau self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan pengawas syariah	1	1	1
15.	Pengungkapan nama dan jabatan direksi serta fungsi	1	1	1

16.	Penjelasan mekanisme kerja direksi (pengambilan keputusan & pendelegasian wewenang)	1	1	1
17.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan direksi serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
18.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas direksi	1	1	1
19.	Penjelasan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal (audit internal dan pengendalian risiko serta sistem pengawasan)	1	1	1
20.	Pengungkapan visi, misi dan nilai perusahaan	1	1	1
21.	Pengungkapan pemilik mayoritas	1	1	1
22.	Pengungkapan investor berbasis <i>profit and loss sharing</i> (pembagian laba dan rugi)	0	0	0
23.	Kebijakan dan remunerasi direksi, dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris	1	1	1
24.	Menyebutkan transaksi dengan pihak yang mempunyai benturan kepentingan	1	1	1
25.	Hasil penilaian implementasi icg dilaporkan pada rapat umum tahunan pemilik	1	1	1
26.	Mengungkapkan kejadian luar biasa yang terjadi di perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan	1	1	1
27.	Melaksanakan zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	1	1	1

28.	Melaksanakan kewajiban sebagai penerima dan penyalur dana zakat, infak, sadaqah, dan wakaf	1	1	1
29.	Terdapat kebijakan yang memastikan fungsi setiap organ perusahaan terlaksana secara efektif	1	1	1
30.	Terdapat kebijakan yang memastikan akuntabilitas, pengendalian internal secara efektif, dan pelaporan keuangan yang benar terlaksana dengan baik	1	1	1
31.	Mengungkapkan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan operasional yang terkait penerapan skema bagi hasil dan skema syariah lainnya	1	1	1
32.	Pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan yang berdasar pada nilai perusahaan dan etika bisnis	1	1	1
33.	Fasilitas bagi pemegang saham dan stakeholder berupa informasi yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian	1	1	1
34.	Kebijakan untuk menyempurnakan peraturan perusahaan untuk memenuhi prinsip ICG	1	1	1
35.	Kebijakan untuk menilai pelaksanaan ICG bagi pelaksana bisnis syariah	1	1	1
36.	Menyelaraskan pemahaman dan kepedulian seluruh anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan dewan direksi, pemegang saham, dan seluruh karyawan terhadap ICG dan berkomitmen untuk melaksanakannya	1	1	1

37.	Melakukan kajian pelaksanaan ICG yang berkaitan dengan kondisi perusahaan dan melakukan tindakan korektif bila diperlukan	1	1	1
38.	Penyusunan pedoman dan program pelaksanaan ICG	1	1	1
39.	Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan ICG bagi seluruh pihak di dalam perusahaan serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman ICG dalam kegiatan perusahaan sehingga tercipta rasa memiliki	1	1	1
40.	Melaksanakan penilaian sendiri atau jasa pihak luar (independen) untuk memastikan penerapan ICG berjalan terus menerus, hasil penilaian diungkapkan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan	1	1	1
41.	Memberikan informasi bagi stakeholder untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan ICG	1	1	1
42.	Mempraktikkan etika bisnis syariah dengan konsisten sehingga dapat mewujudkan bisnis yang sehat, transparan, efisien, dan islami	1	1	1
43.	Mematuhi setiap ketentuan dan ketentuan syariah dalam bisnis, dengan halal dan baik (thayyib) dari segi sebenarnya (dzat) ataupun caranya	1	1	1
44.	Melaksanakan kegiatan dalam perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	1	1	1

45.	Menggunakan aturan perundang undangan dalam membentuk aturan spesifik dalam organisasi atau manajemen dalam perusahaan	1	1	1
46.	Menggunakan asas ICG untuk meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja secara terus menerus	1	1	1
47.	Menerapkan fungsi ombudsman yang berfungsi untuk menampung informasi tentang kemungkinan adanya penyimpangan dalam perusahaan	0	0	0

6. PT Bank Jabar Banten Syariah

No.	Indikator	2018	2019	2020
1.	Pernyataan bahwasannya bank sudah menerapkan ICG pada laporan tahunan yang telah di publikasi	1	1	1
2.	Pengungkapan aspek yang belum terlaksana beserta alasannya	1	1	1
3.	Terdapat nama dewan komisaris dan statusnya (komisaris independen atau komisaris bukan independen)	1	1	1
4.	Penjelasan tugas dan fungsi dewan komisaris	1	1	1
5.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan komisaris serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1

6.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri <i>atau self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan komisaris	1	1	1
7.	Pengungkapan nama anggota komite	1	1	1
8.	Penjelasan mekanisme dan fungsi komite	1	1	1
9.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan komite serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
10.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas komite	1	1	1
11.	Melampirkan laporan tugas komite	1	1	1
12.	Terdapat nama anggota Dewan Pengawas Syariah	1	1	1
13.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan pengawas syariah serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
14.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri <i>atau self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan pengawas syariah	1	1	1
15.	Pengungkapan nama dan jabatan direksi serta fungsi	1	1	1
16.	Penjelasan mekanisme kerja direksi (pengambilan keputusan & pendelegasian wewenang)	1	1	1
17.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan direksi serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
18.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas direksi	1	1	1

19.	Penjelasan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal (audit internal dan pengendalian risiko serta sistem pengawasan)	1	1	1
20.	Pengungkapan visi, misi dan nilai perusahaan	1	1	1
21.	Pengungkapan pemilik mayoritas	1	1	1
22.	Pengungkapan investor berbasis <i>profit and loss sharing</i> (pembagian laba dan rugi)	0	0	0
23.	Kebijakan dan remunerasi direksi, dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris	1	1	1
24.	Menyebutkan transaksi dengan pihak yang mempunyai benturan kepentingan	1	1	1
25.	Hasil penilaian implementasi icg dilaporkan pada rapat umum tahunan pemilik	1	1	1
26.	Mengungkapkan kejadian luar biasa yang terjadi di perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan	1	1	1
27.	Melaksanakan zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	1	1	1
28.	Melaksanakan kewajiban sebagai penerima dan penyalur dana zakat, infak, sadaqah, dan wakaf	1	1	1
29.	Terdapat kebijakan yang memastikan fungsi setiap organ perusahaan terlaksana secara efektif	1	1	1
30.	Terdapat kebijakan yang memastikan akuntabilitas, pengendalian internal secara efektif, dan pelaporan keuangan yang benar terlaksana dengan baik	1	1	1

31.	Mengungkapkan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan operasional yang terkait penerapan skema bagi hasil dan skema syariah lainnya	1	1	1
32.	Pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan yang berdasar pada nilai perusahaan dan etika bisnis	1	1	1
33.	Fasilitas bagi pemegang saham dan stakeholder berupa informasi yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian	1	1	1
34.	Kebijakan untuk menyempurnakan peraturan perusahaan untuk memenuhi prinsip ICG	1	1	1
35.	Kebijakan untuk menilai pelaksanaan ICG bagi pelaksana bisnis syariah	1	1	1
36.	Menyelaraskan pemahaman dan kepedulian seluruh anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan dewan direksi, pemegang saham, dan seluruh karyawan terhadap ICG dan berkomitmen untuk melaksanakannya	1	1	1
37.	Melakukan kajian pelaksanaan ICG yang berkaitan dengan kondisi perusahaan dan melakukan tindakan korektif bila diperlukan	1	1	1
38.	Penyusunan pedoman dan program pelaksanaan ICG	1	1	1
39.	Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan ICG bagi seluruh pihak di dalam perusahaan serta	1	1	1

	pemahaman atas pelaksanaan pedoman ICG dalam kegiatan perusahaan sehingga tercipta rasa memiliki			
40.	Melaksanakan penilaian sendiri atau jasa pihak luar (independen) untuk memastikan penerapan ICG berjalan terus menerus, hasil penilaian diungkapkan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan	1	1	1
41.	Memberikan informasi bagi stakeholder untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan ICG	1	1	1
42.	Mempraktikkan etika bisnis syariah dengan konsisten sehingga dapat mewujudkan bisnis yang sehat, transparan, efisien, dan islami	1	1	1
43.	Mematuhi setiap ketetapan dan ketentuan syariah dalam bisnis, dengan halal dan baik (thayyib) dari segi sebenarnya (dzat) ataupun caranya	1	1	1
44.	Melaksanakan kegiatan dalam perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	1	1	1
45.	Menggunakan aturan perundang undangan dalam membentuk aturan spesifik dalam organisasi atau manajemen dalam perusahaan	1	1	1
46.	Menggunakan asas ICG untuk meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja secara terus menerus	1	1	1

47.	Menerapkan fungsi ombudsman yang berfungsi untuk menampung informasi tentang kemungkinan adanya penyimpangan dalam perusahaan	0	0	0
-----	---	---	---	---

7. PT Bank BNI Syariah

No.	Indikator	2018	2019	2020
1.	Pernyataan bahwasannya bank sudah menerapkan ICG pada laporan tahunan yang telah di publikasi	1	1	1
2.	Pengungkapan aspek yang belum terlaksana beserta alasannya	1	1	1
3.	Terdapat nama dewan komisaris dan statusnya (komisaris independen atau komisaris bukan independen)	1	1	1
4.	Penjelasan tugas dan fungsi dewan komisaris	1	1	1
5.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan komisaris serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
6.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri <i>atau self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan komisaris	1	1	1
7.	Pengungkapan nama anggota komite	1	1	1
8.	Penjelasan mekanisme dan fungsi komite	1	1	1
9.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan komite serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1

10.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas komite	1	1	1
11.	Melampirkan laporan tugas komite	1	1	1
12.	Terdapat nama anggota Dewan Pengawas Syariah	1	1	1
13.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan pengawas syariah serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
14.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri atau <i>self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan pengawas syariah	1	1	1
15.	Pengungkapan nama dan jabatan direksi serta fungsi	1	1	1
16.	Penjelasan mekanisme kerja direksi (pengambilan keputusan & pendelegasian wewenang)	1	1	1
17.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan direksi serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
18.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas direksi	1	1	1
19.	Penjelasan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal (audit internal dan pengendalian risiko serta sistem pengawasan)	1	1	1
20.	Pengungkapan visi, misi dan nilai perusahaan	1	1	1
21.	Pengungkapan pemilik mayoritas	1	1	1
22.	Pengungkapan investor berbasis <i>profit and loss sharing</i> (pembagian laba dan rugi)	0	0	0

23.	Kebijakan dan remunerasi direksi, dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris	1	1	1
24.	Menyebutkan transaksi dengan pihak yang mempunyai benturan kepentingan	1	1	1
25.	Hasil penilaian implementasi icg dilaporkan pada rapat umum tahunan pemilik	1	1	1
26.	Mengungkapkan kejadian luar biasa yang terjadi di perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan	1	1	1
27.	Melaksanakan zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	1	1	1
28.	Melaksanakan kewajiban sebagai penerima dan penyalur dana zakat, infak, sadaqah, dan wakaf	1	1	1
29.	Terdapat kebijakan yang memastikan fungsi setiap organ perusahaan terlaksana secara efektif	1	1	1
30.	Terdapat kebijakan yang memastikan akuntabilitas, pengendalian internal secara efektif, dan pelaporan keuangan yang benar terlaksana dengan baik	1	1	1
31.	Mengungkapkan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan operasional yang terkait penerapan skema bagi hasil dan skema syariah lainnya	1	1	1
32.	Pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan yang berdasar pada nilai perusahaan dan etika bisnis	1	1	1

33.	Fasilitas bagi pemegang saham dan stakeholder berupa informasi yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian	1	1	1
34.	Kebijakan untuk menyempurnakan peraturan perusahaan untuk memenuhi prinsip ICG	1	1	1
35.	Kebijakan untuk menilai pelaksanaan ICG bagi pelaksana bisnis syariah	1	1	1
36.	Menyelaraskan pemahaman dan kepedulian seluruh anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan dewan direksi, pemegang saham, dan seluruh karyawan terhadap ICG dan berkomitmen untuk melaksanakannya	1	1	1
37.	Melakukan kajian pelaksanaan ICG yang berkaitan dengan kondisi perusahaan dan melakukan tindakan korektif bila diperlukan	0	0	1
38.	Penyusunan pedoman dan program pelaksanaan ICG	1	1	1
39.	Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan ICG bagi seluruh pihak di dalam perusahaan serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman ICG dalam kegiatan perusahaan sehingga tercipta rasa memiliki	1	1	1
40.	Melaksanakan penilaian sendiri atau jasa pihak luar (independen) untuk memastikan penerapan ICG berjalan terus menerus, hasil penilaian diungkapkan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan	1	1	1

41.	Memberikan informasi bagi stakeholder untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan ICG	1	1	1
42.	Mempraktikkan etika bisnis syariah dengan konsisten sehingga dapat mewujudkan bisnis yang sehat, transparan, efisien, dan islami	1	1	1
43.	Mematuhi setiap ketetapan dan ketentuan syariah dalam bisnis, dengan halal dan baik (thayyib) dari segi sebenarnya (dzat) ataupun caranya	1	1	1
44.	Melaksanakan kegiatan dalam perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	1	1	1
45.	Menggunakan aturan perundang undangan dalam membentuk aturan spesifik dalam organisasi atau manajemen dalam perusahaan	1	1	1
46.	Menggunakan asas ICG untuk meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja secara terus menerus	1	1	1
47.	Menerapkan fungsi ombudsman yang berfungsi untuk menampung informasi tentang kemungkinan adanya penyimpangan dalam perusahaan	0	0	0

8. PT Bank Syariah Mandiri

No.	Indikator	2018	2019	2020
1.	Pernyataan bahwasannya bank sudah menerapkan ICG pada laporan tahunan yang telah di publikasi	1	1	1
2.	Pengungkapan aspek yang belum terlaksana beserta alasannya	1	1	0
3.	Terdapat nama dewan komisaris dan statusnya (komisaris independen atau komisaris bukan independen)	1	1	1
4.	Penjelasan tugas dan fungsi dewan komisaris	1	1	1
5.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan komisaris serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
6.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri <i>atau self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan komisaris	1	1	1
7.	Pengungkapan nama anggota komite	1	1	1
8.	Penjelasan mekanisme dan fungsi komite	1	1	1
9.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan komite serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
10.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas komite	1	1	1
11.	Melampirkan laporan tugas komite	1	1	1
12.	Terdapat nama anggota Dewan Pengawas Syariah	1	1	1

13.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan pengawas syariah serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
14.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri atau <i>self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan pengawas syariah	1	1	1
15.	Pengungkapan nama dan jabatan direksi serta fungsi	1	1	1
16.	Penjelasan mekanisme kerja direksi (pengambilan keputusan & pendelegasian wewenang)	1	1	1
17.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan direksi serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
18.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas direksi	1	1	1
19.	Penjelasan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal (audit internal dan pengendalian risiko serta sistem pengawasan)	1	1	1
20.	Pengungkapan visi, misi dan nilai perusahaan	1	1	1
21.	Pengungkapan pemilik mayoritas	1	1	1
22.	Pengungkapan investor berbasis <i>profit and loss sharing</i> (pembagian laba dan rugi)	0	0	0
23.	Kebijakan dan remunerasi direksi, dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris	1	1	1
24.	Menyebutkan transaksi dengan pihak yang mempunyai benturan kepentingan	1	1	1

25.	Hasil penilaian implementasi icg dilaporkan pada rapat umum tahunan pemilik	1	1	1
26.	Mengungkapkan kejadian luar biasa yang terjadi di perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan	1	1	1
27.	Melaksanakan zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	1	1	1
28.	Melaksanakan kewajiban sebagai penerima dan penyalur dana zakat, infak, sadaqah, dan wakaf	1	1	1
29.	Terdapat kebijakan yang memastikan fungsi setiap organ perusahaan terlaksana secara efektif	1	1	1
30.	Terdapat kebijakan yang memastikan akuntabilitas, pengendalian internal secara efektif, dan pelaporan keuangan yang benar terlaksana dengan baik	1	1	1
31.	Mengungkapkan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan operasional yang terkait penerapan skema bagi hasil dan skema syariah lainnya	1	1	1
32.	Pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan yang berdasar pada nilai perusahaan dan etika bisnis	1	1	1
33.	Fasilitas bagi pemegang saham dan stakeholder berupa informasi yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian	1	1	1
34.	Kebijakan untuk menyempurnakan peraturan perusahaan untuk memenuhi prinsip ICG	1	1	1

35.	Kebijakan untuk menilai pelaksanaan ICG bagi pelaksana bisnis syariah	1	1	1
36.	Menyelaraskan pemahaman dan kepedulian seluruh anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan dewan direksi, pemegang saham, dan seluruh karyawan terhadap ICG dan berkomitmen untuk melaksanakannya	1	1	1
37.	Melakukan kajian pelaksanaan ICG yang berkaitan dengan kondisi perusahaan dan melakukan tindakan korektif bila diperlukan	1	1	1
38.	Penyusunan pedoman dan program pelaksanaan ICG	1	1	1
39.	Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan ICG bagi seluruh pihak di dalam perusahaan serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman ICG dalam kegiatan perusahaan sehingga tercipta rasa memiliki	1	1	1
40.	Melaksanakan penilaian sendiri atau jasa pihak luar (independen) untuk memastikan penerapan ICG berjalan terus menerus, hasil penilaian diungkapkan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan	1	1	1
41.	Memberikan informasi bagi stakeholder untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan ICG	1	1	1
42.	Mempraktikkan etika bisnis syariah dengan konsisten sehingga dapat mewujudkan bisnis yang sehat, transparan, efisien, dan islami	1	1	1

43.	Mematuhi setiap ketentuan dan ketentuan syariah dalam bisnis, dengan halal dan baik (thayyib) dari segi sebenarnya (dzat) ataupun caranya	1	1	1
44.	Melaksanakan kegiatan dalam perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	1	1	1
45.	Menggunakan aturan perundang undangan dalam membentuk aturan spesifik dalam organisasi atau manajemen dalam perusahaan	1	1	1
46.	Menggunakan asas ICG untuk meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja secara terus menerus	1	1	1
47.	Menerapkan fungsi ombudsman yang berfungsi untuk menampung informasi tentang kemungkinan adanya penyimpangan dalam perusahaan	0	0	0

9. PT Bank Mega Syariah

No.	Indikator	2018	2019	2020
1.	Pernyataan bahwasannya bank sudah menerapkan ICG pada laporan tahunan yang telah di publikasi	1	1	1
2.	Pengungkapan aspek yang belum terlaksana beserta alasannya	1	1	1

3.	Terdapat nama dewan komisaris dan statusnya (komisaris independen atau komisaris bukan independen)	1	1	1
4.	Penjelasan tugas dan fungsi dewan komisaris	1	1	1
5.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan komisaris serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
6.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri <i>atau self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan komisaris	1	1	1
7.	Pengungkapan nama anggota komite	1	1	1
8.	Penjelasan mekanisme dan fungsi komite	1	1	1
9.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan komite serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
10.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas komite	1	1	1
11.	Melampirkan laporan tugas komite	1	1	1
12.	Terdapat nama anggota Dewan Pengawas Syariah	1	1	1
13.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan pengawas syariah serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
14.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri <i>atau self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan pengawas syariah	1	1	1
15.	Pengungkapan nama dan jabatan direksi serta fungsi	1	1	1

16.	Penjelasan mekanisme kerja direksi (pengambilan keputusan & pendelegasian wewenang)	1	1	1
17.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan direksi serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
18.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas direksi	1	1	1
19.	Penjelasan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal (audit internal dan pengendalian risiko serta sistem pengawasan)	1	1	1
20.	Pengungkapan visi, misi dan nilai perusahaan	1	1	1
21.	Pengungkapan pemilik mayoritas	1	1	1
22.	Pengungkapan investor berbasis <i>profit and loss sharing</i> (pembagian laba dan rugi)	0	0	0
23.	Kebijakan dan remunerasi direksi, dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris	1	1	1
24.	Menyebutkan transaksi dengan pihak yang mempunyai benturan kepentingan	1	1	1
25.	Hasil penilaian implementasi icg dilaporkan pada rapat umum tahunan pemilik	1	1	1
26.	Mengungkapkan kejadian luar biasa yang terjadi di perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan	1	1	1
27.	Melaksanakan zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	1	1	1

28.	Melaksanakan kewajiban sebagai penerima dan penyalur dana zakat, infak, sadaqah, dan wakaf	1	1	1
29.	Terdapat kebijakan yang memastikan fungsi setiap organ perusahaan terlaksana secara efektif	1	1	1
30.	Terdapat kebijakan yang memastikan akuntabilitas, pengendalian internal secara efektif, dan pelaporan keuangan yang benar terlaksana dengan baik	1	1	1
31.	Mengungkapkan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan operasional yang terkait penerapan skema bagi hasil dan skema syariah lainnya	1	1	1
32.	Pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan yang berdasar pada nilai perusahaan dan etika bisnis	1	1	1
33.	Fasilitas bagi pemegang saham dan stakeholder berupa informasi yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian	1	1	1
34.	Kebijakan untuk menyempurnakan peraturan perusahaan untuk memenuhi prinsip ICG	1	1	1
35.	Kebijakan untuk menilai pelaksanaan ICG bagi pelaksana bisnis syariah	1	1	1
36.	Menyelaraskan pemahaman dan kepedulian seluruh anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan dewan direksi, pemegang saham, dan seluruh karyawan terhadap ICG dan berkomitmen untuk melaksanakannya	1	1	1

37.	Melakukan kajian pelaksanaan ICG yang berkaitan dengan kondisi perusahaan dan melakukan tindakan korektif bila diperlukan	1	1	1
38.	Penyusunan pedoman dan program pelaksanaan ICG	1	1	1
39.	Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan ICG bagi seluruh pihak di dalam perusahaan serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman ICG dalam kegiatan perusahaan sehingga tercipta rasa memiliki	1	1	1
40.	Melaksanakan penilaian sendiri atau jasa pihak luar (independen) untuk memastikan penerapan ICG berjalan terus menerus, hasil penilaian diungkapkan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan	1	1	1
41.	Memberikan informasi bagi stakeholder untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan ICG	1	1	1
42.	Mempraktikkan etika bisnis syariah dengan konsisten sehingga dapat mewujudkan bisnis yang sehat, transparan, efisien, dan islami	1	1	1
43.	Mematuhi setiap ketentuan dan ketentuan syariah dalam bisnis, dengan halal dan baik (thayyib) dari segi sebenarnya (dzat) ataupun caranya	1	1	1
44.	Melaksanakan kegiatan dalam perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	1	1	1

45.	Menggunakan aturan perundang undangan dalam membentuk aturan spesifik dalam organisasi atau manajemen dalam perusahaan	1	1	1
46.	Menggunakan asas ICG untuk meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja secara terus menerus	1	1	1
47.	Menerapkan fungsi ombudsman yang berfungsi untuk menampung informasi tentang kemungkinan adanya penyimpangan dalam perusahaan	0	0	0

10. PT Bank Panin Dubai Syariah

No.	Indikator	2018	2019	2020
1.	Pernyataan bahwasannya bank sudah menerapkan ICG pada laporan tahunan yang telah di publikasi	1	1	1
2.	Pengungkapan aspek yang belum terlaksana beserta alasannya	1	1	1
3.	Terdapat nama dewan komisaris dan statusnya (komisaris independen atau komisaris bukan independen)	1	1	1
4.	Penjelasan tugas dan fungsi dewan komisaris	1	1	1
5.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan komisaris serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1

6.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri <i>atau self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan komisaris	1	1	1
7.	Pengungkapan nama anggota komite	1	1	1
8.	Penjelasan mekanisme dan fungsi komite	1	1	1
9.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan komite serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
10.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas komite	1	1	1
11.	Melampirkan laporan tugas komite	1	1	1
12.	Terdapat nama anggota Dewan Pengawas Syariah	1	1	1
13.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan pengawas syariah serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
14.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri <i>atau self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan pengawas syariah	1	1	1
15.	Pengungkapan nama dan jabatan direksi serta fungsi	1	1	1
16.	Penjelasan mekanisme kerja direksi (pengambilan keputusan & pendelegasian wewenang)	1	1	1
17.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan direksi serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
18.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas direksi	1	1	1

19.	Penjelasan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal (audit internal dan pengendalian risiko serta sistem pengawasan)	1	1	1
20.	Pengungkapan visi, misi dan nilai perusahaan	1	1	1
21.	Pengungkapan pemilik mayoritas	1	1	1
22.	Pengungkapan investor berbasis <i>profit and loss sharing</i> (pembagian laba dan rugi)	0	0	0
23.	Kebijakan dan remunerasi direksi, dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris	1	1	1
24.	Menyebutkan transaksi dengan pihak yang mempunyai benturan kepentingan	1	1	1
25.	Hasil penilaian implementasi icg dilaporkan pada rapat umum tahunan pemilik	1	1	1
26.	Mengungkapkan kejadian luar biasa yang terjadi di perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan	1	1	1
27.	Melaksanakan zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	0	1	1
28.	Melaksanakan kewajiban sebagai penerima dan penyalur dana zakat, infak, sadaqah, dan wakaf	0	1	1
29.	Terdapat kebijakan yang memastikan fungsi setiap organ perusahaan terlaksana secara efektif	1	1	1
30.	Terdapat kebijakan yang memastikan akuntabilitas, pengendalian internal secara efektif, dan pelaporan keuangan yang benar terlaksana dengan baik	1	1	1

31.	Mengungkapkan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan operasional yang terkait penerapan skema bagi hasil dan skema syariah lainnya	1	1	1
32.	Pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan yang berdasar pada nilai perusahaan dan etika bisnis	1	1	1
33.	Fasilitas bagi pemegang saham dan stakeholder berupa informasi yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian	1	1	1
34.	Kebijakan untuk menyempurnakan peraturan perusahaan untuk memenuhi prinsip ICG	1	1	1
35.	Kebijakan untuk menilai pelaksanaan ICG bagi pelaksana bisnis syariah	1	1	1
36.	Menyelaraskan pemahaman dan kepedulian seluruh anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan dewan direksi, pemegang saham, dan seluruh karyawan terhadap ICG dan berkomitmen untuk melaksanakannya	1	1	1
37.	Melakukan kajian pelaksanaan ICG yang berkaitan dengan kondisi perusahaan dan melakukan tindakan korektif bila diperlukan	1	1	1
38.	Penyusunan pedoman dan program pelaksanaan ICG1	1	1	1
39.	Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan ICG bagi seluruh pihak di dalam perusahaan serta	1	1	1

	pemahaman1 atas pelaksanaan pedoman ICG dalam kegiatan perusahaan sehingga tercipta rasa memiliki			
40.	Melaksanakan penilaian sendiri atau jasa pihak luar (independen) untuk memastikan penerapan ICG berjalan terus menerus, hasil penilaian diungkapkan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan	1	1	1
41.	Memberikan informasi bagi stakeholder untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan ICG	1	1	1
42.	Mempraktikkan etika bisnis syariah dengan konsisten sehingga dapat mewujudkan bisnis yang sehat, transparan, efisien, dan islami	1	1	1
43.	Mematuhi setiap ketetapan dan ketentuan syariah dalam bisnis, dengan halal dan baik (thayyib) dari segi sebenarnya (dzat) ataupun caranya	1	1	1
44.	Melaksanakan kegiatan dalam perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	1	1	1
45.	Menggunakan aturan perundang undangan dalam membentuk aturan spesifik dalam organisasi atau manajemen dalam perusahaan	1	1	1
46.	Menggunakan asas ICG untuk meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja secara terus menerus	1	1	1

47.	Menerapkan fungsi ombudsman yang berfungsi untuk menampung informasi tentang kemungkinan adanya penyimpangan dalam perusahaan	0	0	0
-----	---	---	---	---

11. PT Bank Syariah Bukopin

No.	Indikator	2018	2019	2020
1.	Pernyataan bahwasannya bank sudah menerapkan ICG pada laporan tahunan yang telah di publikasi	1	1	1
2.	Pengungkapan aspek yang belum terlaksana beserta alasannya	1	1	1
3.	Terdapat nama dewan komisaris dan statusnya (komisaris independen atau komisaris bukan independen)	1	1	1
4.	Penjelasan tugas dan fungsi dewan komisaris	1	1	1
5.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan komisaris serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
6.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri <i>atau self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan komisaris	1	1	1
7.	Pengungkapan nama anggota komite	1	1	1
8.	Penjelasan mekanisme dan fungsi komite	1	1	1
9.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan komite serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
10.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas komite	1	1	1

11.	Melampirkan laporan tugas komite	1	1	1
12.	Terdapat nama anggota Dewan Pengawas Syariah	1	1	1
13.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan pengawas syariah serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
14.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri atau <i>self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan pengawas syariah	1	1	1
15.	Pengungkapan nama dan jabatan direksi serta fungsi	1	1	1
16.	Penjelasan mekanisme kerja direksi (pengambilan keputusan & pendelegasian wewenang)	1	1	1
17.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan direksi serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
18.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas direksi	1	1	1
19.	Penjelasan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal (audit internal dan pengendalian risiko serta sistem pengawasan)	1	1	1
20.	Pengungkapan visi, misi dan nilai perusahaan	1	1	1
21.	Pengungkapan pemilik mayoritas	1	1	1
22.	Pengungkapan investor berbasis <i>profit and loss sharing</i> (pembagian laba dan rugi)	0	0	0
23.	Kebijakan dan remunerasi direksi, dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris	1	1	1

24.	Menyebutkan transaksi dengan pihak yang mempunyai benturan kepentingan	1	1	1
25.	Hasil penilaian implementasi icg dilaporkan pada rapat umum tahunan pemilik	1	1	1
26.	Mengungkapkan kejadian luar biasa yang terjadi di perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan	1	1	1
27.	Melaksanakan zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	0	0	0
28.	Melaksanakan kewajiban sebagai penerima dan penyalur dana zakat, infak, sadaqah, dan wakaf	0	0	0
29.	Terdapat kebijakan yang memastikan fungsi setiap organ perusahaan terlaksana secara efektif	1	1	1
30.	Terdapat kebijakan yang memastikan akuntabilitas, pengendalian internal secara efektif, dan pelaporan keuangan yang benar terlaksana dengan baik	1	1	1
31.	Mengungkapkan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan operasional yang terkait penerapan skema bagi hasil dan skema syariah lainnya	1	1	1
32.	Pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan yang berdasar pada nilai perusahaan dan etika bisnis	1	1	1
33.	Fasilitas bagi pemegang saham dan stakeholder berupa informasi yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian	1	1	1

34.	Kebijakan untuk menyempurnakan peraturan perusahaan untuk memenuhi prinsip ICG	1	1	1
35.	Kebijakan untuk menilai pelaksanaan ICG bagi pelaksana bisnis syariah	1	1	1
36.	Menyelaraskan pemahaman dan kepedulian seluruh anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan dewan direksi, pemegang saham, dan seluruh karyawan terhadap ICG dan berkomitmen untuk melaksanakannya	1	1	1
37.	Melakukan kajian pelaksanaan ICG yang berkaitan dengan kondisi perusahaan dan melakukan tindakan korektif bila diperlukan	1	1	1
38.	Penyusunan pedoman dan program pelaksanaan ICG	1	1	1
39.	Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan ICG bagi seluruh pihak di dalam perusahaan serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman ICG dalam kegiatan perusahaan sehingga tercipta rasa memiliki	1	1	1
40.	Melaksanakan penilaian sendiri atau jasa pihak luar (independen) untuk memastikan penerapan ICG berjalan terus menerus, hasil penilaian diungkapkan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan	1	1	1
41.	Memberikan informasi bagi stakeholder untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan ICG	1	1	1

42.	Mempraktikkan etika bisnis syariah dengan konsisten sehingga dapat mewujudkan bisnis yang sehat, transparan, efisien, dan islami	1	1	1
43.	Mematuhi setiap ketentuan dan ketentuan syariah dalam bisnis, dengan halal dan baik (thayyib) dari segi sebenarnya (dzat) ataupun caranya	1	1	1
44.	Melaksanakan kegiatan dalam perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	1	1	1
45.	Menggunakan aturan perundang undangan dalam membentuk aturan spesifik dalam organisasi atau manajemen dalam perusahaan	1	1	1
46.	Menggunakan asas ICG untuk meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja secara terus menerus	1	1	1
47.	Menerapkan fungsi ombudsman yang berfungsi untuk menampung informasi tentang kemungkinan adanya penyimpangan dalam perusahaan	0	0	0

12. PT BCA Syariah

No.	Indikator	2018	2019	2020
1.	Pernyataan bahwasannya bank sudah menerapkan ICG pada laporan tahunan yang telah di publikasi	1	1	1
2.	Pengungkapan aspek yang belum terlaksana beserta alasannya	1	1	1

3.	Terdapat nama dewan komisaris dan statusnya (komisaris independen atau komisaris bukan independen)	1	1	1
4.	Penjelasan tugas dan fungsi dewan komisaris	1	1	1
5.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan komisaris serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
6.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri <i>atau self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan komisaris	1	1	1
7.	Pengungkapan nama anggota komite	1	1	1
8.	Penjelasan mekanisme dan fungsi komite	1	1	1
9.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan komite serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
10.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas komite	1	1	1
11.	Melampirkan laporan tugas komite	1	1	1
12.	Terdapat nama anggota Dewan Pengawas Syariah	1	1	1
13.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan pengawas syariah serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
14.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri <i>atau self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan pengawas syariah	1	1	1
15.	Pengungkapan nama dan jabatan direksi serta fungsi	1	1	1

16.	Penjelasan mekanisme kerja direksi (pengambilan keputusan & pendelegasian wewenang)	1	1	1
17.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan direksi serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
18.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas direksi	1	1	1
19.	Penjelasan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal (audit internal dan pengendalian risiko serta sistem pengawasan)	1	1	1
20.	Pengungkapan visi, misi dan nilai perusahaan	1	1	1
21.	Pengungkapan pemilik mayoritas	1	1	1
22.	Pengungkapan investor berbasis <i>profit and loss sharing</i> (pembagian laba dan rugi)	0	0	0
23.	Kebijakan dan remunerasi direksi, dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris	1	1	1
24.	Menyebutkan transaksi dengan pihak yang mempunyai benturan kepentingan	1	1	1
25.	Hasil penilaian implementasi icg dilaporkan pada rapat umum tahunan pemilik	1	1	1
26.	Mengungkapkan kejadian luar biasa yang terjadi di perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan	1	1	1
27.	Melaksanakan zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	1	1	1

28.	Melaksanakan kewajiban sebagai penerima dan penyalur dana zakat, infak, sadaqah, dan wakaf	1	1	1
29.	Terdapat kebijakan yang memastikan fungsi setiap organ perusahaan terlaksana secara efektif	1	1	1
30.	Terdapat kebijakan yang memastikan akuntabilitas, pengendalian internal secara efektif, dan pelaporan keuangan yang benar terlaksana dengan baik	1	1	1
31.	Mengungkapkan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan operasional yang terkait penerapan skema bagi hasil dan skema syariah lainnya	1	1	1
32.	Pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan yang berdasar pada nilai perusahaan dan etika bisnis	1	1	1
33.	Fasilitas bagi pemegang saham dan stakeholder berupa informasi yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian	1	1	1
34.	Kebijakan untuk menyempurnakan peraturan perusahaan untuk memenuhi prinsip ICG	1	1	1
35.	Kebijakan untuk menilai pelaksanaan ICG bagi pelaksana bisnis syariah	1	1	1
36.	Menyelaraskan pemahaman dan kepedulian seluruh anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan dewan direksi, pemegang saham, dan seluruh karyawan terhadap ICG dan berkomitmen untuk melaksanakannya	1	1	1

37.	Melakukan kajian pelaksanaan ICG yang berkaitan dengan kondisi perusahaan dan melakukan tindakan korektif bila diperlukan	1	1	1
38.	Penyusunan pedoman dan program pelaksanaan ICG	1	1	1
39.	Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan ICG bagi seluruh pihak di dalam perusahaan serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman ICG dalam kegiatan perusahaan sehingga tercipta rasa memiliki	1	1	1
40.	Melaksanakan penilaian sendiri atau jasa pihak luar (independen) untuk memastikan penerapan ICG berjalan terus menerus, hasil penilaian diungkapkan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan	1	1	1
41.	Memberikan informasi bagi stakeholder untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan ICG	1	1	1
42.	Mempraktikkan etika bisnis syariah dengan konsisten sehingga dapat mewujudkan bisnis yang sehat, transparan, efisien, dan islami	1	1	1
43.	Mematuhi setiap ketentuan dan ketentuan syariah dalam bisnis, dengan halal dan baik (thayyib) dari segi sebenarnya (dzat) ataupun caranya	1	1	1
44.	Melaksanakan kegiatan dalam perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	1	1	1

45.	Menggunakan aturan perundang undangan dalam membentuk aturan spesifik dalam organisasi atau manajemen dalam perusahaan	1	1	1
46.	Menggunakan asas ICG untuk meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja secara terus menerus	1	1	1
47.	Menerapkan fungsi ombudsman yang berfungsi untuk menampung informasi tentang kemungkinan adanya penyimpangan dalam perusahaan	0	0	0

13. PT BTPN Syariah

No.	Indikator	2018	2019	2020
1.	Pernyataan bahwasannya bank sudah menerapkan ICG pada laporan tahunan yang telah di publikasi	1	1	1
2.	Pengungkapan aspek yang belum terlaksana beserta alasannya	1	1	1
3.	Terdapat nama dewan komisaris dan statusnya (komisaris independen atau komisaris bukan independen)	1	1	1
4.	Penjelasan tugas dan fungsi dewan komisaris	1	1	1
5.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan komisaris serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1

6.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri <i>atau self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan komisaris	1	1	1
7.	Pengungkapan nama anggota komite	1	1	1
8.	Penjelasan mekanisme dan fungsi komite	1	1	1
9.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan komite serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
10.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas komite	1	1	1
11.	Melampirkan laporan tugas komite	1	1	1
12.	Terdapat nama anggota Dewan Pengawas Syariah	1	1	1
13.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan pengawas syariah serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
14.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri <i>atau self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan pengawas syariah	1	1	1
15.	Pengungkapan nama dan jabatan direksi serta fungsi	1	1	1
16.	Penjelasan mekanisme kerja direksi (pengambilan keputusan & pendelegasian wewenang)	1	1	1
17.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan direksi serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
18.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas direksi	1	1	1

19.	Penjelasan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal (audit internal dan pengendalian risiko serta sistem pengawasan)	1	1	1
20.	Pengungkapan visi, misi dan nilai perusahaan	1	1	1
21.	Pengungkapan pemilik mayoritas	1	1	1
22.	Pengungkapan investor berbasis <i>profit and loss sharing</i> (pembagian laba dan rugi)	0	0	0
23.	Kebijakan dan remunerasi direksi, dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris	1	1	1
24.	Menyebutkan transaksi dengan pihak yang mempunyai benturan kepentingan	1	1	1
25.	Hasil penilaian implementasi icg dilaporkan pada rapat umum tahunan pemilik	1	1	1
26.	Mengungkapkan kejadian luar biasa yang terjadi di perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan	1	1	1
27.	Melaksanakan zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	0	0	0
28.	Melaksanakan kewajiban sebagai penerima dan penyalur dana zakat, infak, sadaqah, dan wakaf	0	0	0
29.	Terdapat kebijakan yang memastikan fungsi setiap organ perusahaan terlaksana secara efektif	1	1	1
30.	Terdapat kebijakan yang memastikan akuntabilitas, pengendalian internal secara efektif, dan pelaporan keuangan yang benar terlaksana dengan baik	1	1	1

31.	Mengungkapkan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan operasional yang terkait penerapan skema bagi hasil dan skema syariah lainnya	1	1	1
32.	Pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan yang berdasar pada nilai perusahaan dan etika bisnis	1	1	1
33.	Fasilitas bagi pemegang saham dan stakeholder berupa informasi yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian	1	1	1
34.	Kebijakan untuk menyempurnakan peraturan perusahaan untuk memenuhi prinsip ICG	1	1	1
35.	Kebijakan untuk menilai pelaksanaan ICG bagi pelaksana bisnis syariah	1	1	1
36.	Menyelaraskan pemahaman dan kepedulian seluruh anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan dewan direksi, pemegang saham, dan seluruh karyawan terhadap ICG dan berkomitmen untuk melaksanakannya	1	1	1
37.	Melakukan kajian pelaksanaan ICG yang berkaitan dengan kondisi perusahaan dan melakukan tindakan korektif bila diperlukan	1	1	1
38.	Penyusunan pedoman dan program pelaksanaan ICG	1	1	1
39.	Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan ICG bagi seluruh pihak di dalam perusahaan serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman ICG dalam	1	1	1

	kegiatan perusahaan sehingga tercipta rasa memiliki			
40.	Melaksanakan penilaian sendiri atau jasa pihak luar (independen) untuk memastikan penerapan ICG berjalan terus menerus, hasil penilaian diungkapkan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan	1	1	1
141.	Memberikan informasi bagi stakeholder untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan ICG	1	1	1
412.	Mempraktikkan etika bisnis syariah dengan konsisten sehingga dapat mewujudkan bisnis yang sehat, transparan, efisien, dan islami	1	1	1
431.	Mematuhi setiap ketentuan dan ketentuan syariah dalam bisnis, dengan halal dan baik (thayyib) dari segi sebenarnya (dzat) ataupun caranya	1	1	1
44.1	Melaksanakan kegiatan dalam perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	1	1	1
45.1	Menggunakan aturan perundang undangan dalam membentuk aturan spesifik dalam organisasi atau manajemen dalam perusahaan	1	1	1
46.1	Menggunakan asas ICG untuk meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja secara terus menerus	1	1	1

47.1	Menerapkan fungsi ombudsman yang berfungsi untuk menampung informasi tentang kemungkinan adanya penyimpangan dalam perusahaan	0	0	0
------	---	---	---	---

14. PT Maybank Syariah Indonesia

No.	Indikator	2018	2019	2020
1.	Pernyataan bahwasannya bank sudah menerapkan ICG pada laporan tahunan yang telah di publikasi	1	1	1
2.	Pengungkapan aspek yang belum terlaksana beserta alasannya	1	1	1
3.	Terdapat nama dewan komisaris dan statusnya (komisaris independen atau komisaris bukan independen)	1	1	1
4.	Penjelasan tugas dan fungsi dewan komisaris	1	1	1
5.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan komisaris serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
6.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri <i>atau self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan komisaris	1	1	1
7.	Pengungkapan nama anggota komite	1	1	1
8.	Penjelasan mekanisme dan fungsi komite	1	1	1
9.	Mengungkapkan jumlah rapat yang dilaksanakan komite serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1

10.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas komite	1	1	1
11.	Melampirkan laporan tugas komite	1	1	1
12.	Terdapat nama anggota Dewan Pengawas Syariah	1	1	1
13.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan pengawas syariah serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
14.	Kriteria dan mekanisme penilaian sendiri atau <i>self assessment</i> terhadap tugas anggota dewan pengawas syariah	1	1	1
15.	Pengungkapan nama dan jabatan direksi serta fungsi	1	1	1
16.	Penjelasan mekanisme kerja direksi (pengambilan keputusan & pendelegasian wewenang)	1	1	1
17.	Pengungkapan jumlah rapat yang dilaksanakan direksi serta jumlah kehadiran anggota saat rapat	1	1	1
18.	Menjelaskan kriteria penilaian dan mekanisme tugas direksi	1	1	1
19.	Penjelasan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal (audit internal dan pengendalian risiko serta sistem pengawasan)	1	1	1
20.	Pengungkapan visi, misi dan nilai perusahaan	1	1	1
21.	Pengungkapan pemilik mayoritas	1	1	1
22.	Pengungkapan investor berbasis <i>profit and loss sharing</i> (pembagian laba dan rugi)	0	0	0

23.	Kebijakan dan remunerasi direksi, dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris	1	1	1
24.	Menyebutkan transaksi dengan pihak yang mempunyai benturan kepentingan	1	1	1
25.	Hasil penilaian implementasi icg dilaporkan pada rapat umum tahunan pemilik	1	1	1
26.	Mengungkapkan kejadian luar biasa yang terjadi di perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan	1	1	1
27.	Melaksanakan zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	1	1	1
28.	Melaksanakan kewajiban sebagai penerima dan penyalur dana zakat, infak, sadaqah, dan wakaf	1	1	1
29.	Terdapat kebijakan yang memastikan fungsi setiap organ perusahaan terlaksana secara efektif	1	1	1
30.	Terdapat kebijakan yang memastikan akuntabilitas, pengendalian internal secara efektif, dan pelaporan keuangan yang benar terlaksana dengan baik	1	1	1
31.	Mengungkapkan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan operasional yang terkait penerapan skema bagi hasil dan skema syariah lainnya	1	1	1
32.	Pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan yang berdasar pada nilai perusahaan dan etika bisnis	1	1	1

33.	Fasilitas bagi pemegang saham dan stakeholder berupa informasi yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian	1	1	1
34.	Kebijakan untuk menyempurnakan peraturan perusahaan untuk memenuhi prinsip ICG	1	1	1
35.	Kebijakan untuk menilai pelaksanaan ICG bagi pelaksana bisnis syariah	1	1	1
36.	Menyelaraskan pemahaman dan kepedulian seluruh anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan dewan direksi, pemegang saham, dan seluruh karyawan terhadap ICG dan berkomitmen untuk melaksanakannya	1	1	1
37.	Melakukan kajian pelaksanaan ICG yang berkaitan dengan kondisi perusahaan dan melakukan tindakan korektif bila diperlukan	1	1	1
38.	Penyusunan pedoman dan program pelaksanaan ICG	1	1	1
39.	Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan ICG bagi seluruh pihak di dalam perusahaan serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman ICG dalam kegiatan perusahaan sehingga tercipta rasa memiliki	1	1	1
40.	Melaksanakan penilaian sendiri atau jasa pihak luar (independen) untuk memastikan penerapan ICG berjalan terus menerus, hasil penilaian diungkapkan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan	1	1	1

41.	Memberikan informasi bagi stakeholder untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan ICG	1	1	1
42.	Mempraktikkan etika bisnis syariah dengan konsisten sehingga dapat mewujudkan bisnis yang sehat, transparan, efisien, dan islami	1	1	1
43.	Mematuhi setiap ketentuan dan ketentuan syariah dalam bisnis, dengan halal dan baik (thayyib) dari segi sebenarnya (dzat) ataupun caranya	1	1	1
44.	Melaksanakan kegiatan dalam perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	1	1	1
45.	Menggunakan aturan perundang undangan dalam membentuk aturan spesifik dalam organisasi atau manajemen dalam perusahaan	1	1	1
46.	Menggunakan asas ICG untuk meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja secara terus menerus	1	1	1
47.	Menerapkan fungsi ombudsman yang berfungsi untuk menampung informasi tentang kemungkinan adanya penyimpangan dalam perusahaan	0	0	0